



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023



OLEH :
ORGANISASI SETDA
KAB. TANJUNG JABUNG
BARAT



Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag
Bupati Tanjung Jabung Barat

BUPATI



Hairan, SH
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

WAKIL BUPATI



H. Dahlan, S. Sos, MM

SEKRETARIS DAERAH



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr, wb

Syukur alhamdulillah Patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat Informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (Lima) Tahun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2023. Secara umum kinerja Tahun 2023 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.



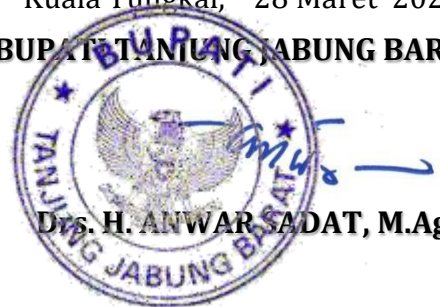
Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja, keuangan dan pengawasan.

Akhirnya tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian sehingga maksud dan tujuan sesungguhnya tercapai dan bermanfaat bagi semua *stakeholders*. Kami mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Kuala Tungkal, 28 Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
IKHTISAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.....	2
1.2.1. Letak Wilayah Geografi.....	2
1.2.2. Luas Wilayah.....	3
1.2.3. Topografi.....	4
1.2.4. Karakteristik Wilayah.....	6
1.2.5. Perekonomian dan Sosial Budaya.....	8
1.2.6. Keuangan Daerah (Anggaran).....	8
1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.....	9
1.3.1. Kelembagaan.....	9
1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah.....	14
1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	15
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN.....	44
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	47
BAB II PERENCANAAN KINERJA	48
2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021.....	48
2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	48
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	52
2.4. PERJANJIAN KINERJA.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	61
3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA.....	65
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	125
BAB IV PENUTUP	130
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Table 1. Data Kecamatan dan Kelurahan.....	3
Table 2. Luas Daerah Kecamatan Tahun 2023.....	4
Table 3. Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5
Table 4. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	17
Table 5. Indikator Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024	35
Table 6. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera	36
Table 7. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran	52
Table 8. Indikator Kinerja Utama	55
Table 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	59
Table 10. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	62
Table 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2023.....	63
Table 12. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	65
Table 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia	75
Table 14. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	77
Table 15. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman	80
Table 16. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	82
Table 17. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	84
Table 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	86
Table 19. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	87
Table 20. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	87
Table 21. Kategori Penilaian SAKIP	87
Table 22. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Sakip Kabupaten.....	92
Table 23. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	94
Table 24. Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	95
Table 25. Evaluasi Unsur SKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat	96
Table 26. IKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	97
Table 27. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dan 2023	98
Table 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.....	101
Table 29. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	102
Table 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan.....	103
Table 31. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	105
Table 32. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi	111
Table 33. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	112
Table 34. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	116
Table 35. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja.....	118
Table 36. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur	123
Table 37. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat	126
Table 38. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2023.....	127
Table 39. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja.....	128



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	14
Grafik 2. Capaian Kinerja Tahun 2023	64
Grafik 3. Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat.....	66
Grafik 4. Pengeluaran Perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat.....	70
Grafik 5. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat.....	83
Grafik 6. Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 S/D 2023	89
Grafik 7. Histogram kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	96
Grafik 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi	105
Grafik 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat.....	108
Grafik 10. Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023	118



IKHTISAR

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2023, sebagai tolak ukur peningkatan kinerja kedepan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana program - program yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026, tentunya sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dilaksanakan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Dimana dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, hambatan - hambatan / kendala yang ditemui dalam pelaksanaan serta mengungkapkan juga strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (*IKU*). Dalam dokumen ditetapkan 9 (*Sembilan*) sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2023 masuk dalam kategori "BERHASIL", karena rata-rata capaiannya 101.11% dari target. realisasi terhadap capaian 10 indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dari target yaitu Indeks Pembangunan manusia 104,28%, Indeks Ketentraman 103.13%, Indeks Reformasi Birokrasi 93.83%, Nilai SAKIP Kabupaten 96,89%, Indeks Kepuasan Masyarakat 99.10%, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 100%, Laju Pertumbuhan Ekonomi 140,4%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 105.80%, Indeks gini 114,28% dan Indeks Infrastruktur 66,32%



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (*tiga*) bulan setelah Tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja (*LKj*) Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini merupakan sebuah bentuk laporan yang disusun setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten serta sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para *stakeholder*, maka penyusunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memiliki 2 (*dua*) dimensi fungsi, yaitu :

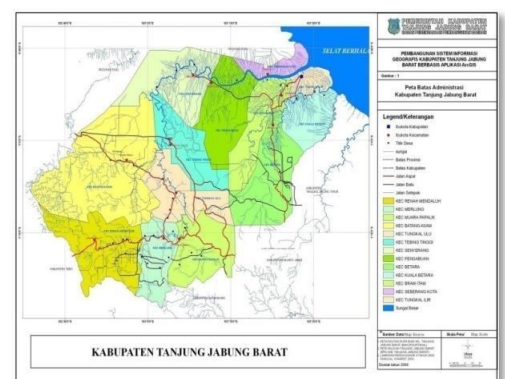
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja (*Dimensi eksternal*) hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada seluruh pihak eksternal (*stakeholder*) atas capaian kinerja selama periode Tahun 2023. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.
2. Aspek Manajemen Kinerja (*Dimensi Internal*) hal ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan pada setiap indikator sasaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.2.1. Letak Wilayah Geografi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' – 104°31' Bujur Timur, dibagian Timur Provinsi Jambi, dialiri Sungai Pengabuan dari hulu hingga ke hilir yang bermuara dan berbatas dengan Laut Cina Selatan dengan menggunakan transportasi laut dapat menuju ke Kota





Batam Provinsi Kepulauan Riau (*Kepri*) dan Negara Singapura. Dimana jarak kota Kuala Tungkal ke Singapura \pm 90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam, dengan daratan seluas 4.868,08 Km² dan perairan 141,75 Km² dengan batas-batas yaitu sebelah :

Utara : Laut China Selatan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Selatan : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Barat : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo.

Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2.2. Luas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 Km² atau \pm 9,38% dari luas Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0^o53' - 01^o41' Lintang Selatan dan antara 103^o23' - 104^o21' Bujur Timur, dan dibagi dalam 13 Kecamatan dan 20 Kelurahan

Table 1. Data Kecamatan dan Kelurahan

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	KET.
1	Tungkal Ilir	Tungkal II	
		Tungkal III	
		Tungkal IV Kota	
		Patunas	
		Sriwijaya	
		Kampung Nelayan	
		Tungkal Harapan	
		Sungai Nibung	
2	Tungkal Ulu	Pelabuhan Dagang	
3	Batang Asam	Dusun Kebun	
4	Betara	Mekar Jaya	
5	Bram Itam	Bram Itam Kiri	
6	Kuala Betara	Betara Kiri	
7	Merlung	Merlung	
8	Muara Papalik	Rantau Badak	
9	Pengabuan	Teluk Nilau	
10	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	
11	Seberang Kota	Tungkal V	
12	Senyerang	Senyerang	



13	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	
----	---------------	---------------	--

Table 2. Luas Daerah Kecamatan Tahun 2023

No.	KECAMATAN (Subdistrict)	IBU KOTA KECAMATAN (Capital Of Subdistrict)	LUAS TOTAL AREA (Km2/Sq.Km)
1	2	3	4
1	Tungkal Ilir	Kuala Tungkal	100.31
2	Tungkal Ulu	Pelabuhan Dagang	345,69
3	Batang Asam	Dusun Kebun	1.042.37
4	Betara	Mekar Jaya	570.21
5	Bram Itam	Bram Itam Kiri	312.66
6	Kuala Betara	Betara Kiri	185.89
7	Merlung	Merlung	311.64
8	Muara Papalik	Rantau Badak	336.38
9	Pengabuan	Teluk Nilau	440.13
10	Renah Mendaluh	Lubuk Kambing	473.72
11	Seberang Kota	Tungkal V	121.28
12	Senyerang	Senyerang	426.66
13	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	342.88
TANJUNG JABUNG BARAT			5.009.82

1.2.3. Topografi

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada



dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air

laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini

berpengaruh pada kedalaman air tanah (*kedalaman lebih dari 100 meter*) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada



daratan sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara Topografi alamnya berbentuk dataran tinggi dan sebagian lagi merupakan dataran rendah, dimana tekstur tanahnya adalah sebagian tanah berlumpur karena dekat dengan laut dan sebagian lagi tanah kering, kemudian beriklim tropis basah dengan variasi kecil tergantung kelembaban nisbi, dataran tinggi temperatur max 27°C, dataran rendah temperatur 32°C Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9°C, suhu udara maksimum mencapai 32°C dan suhu udara minimum 21°C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 sebanyak 324.160 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 65 orang per kilometer persegi (KM²).

**Table 3. Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH	KEPADATAN PENDUDUK
1	2	3	4	5
1	Tungkal Ilir	100,31	74.655	744,24
2	Tungkal Ulu	345,69	14.719	42,58
3	Batang Asam	1.042,37	34.648	33,24
4	Betara	570,21	30.801	54,02
5	Bram Itam	312,66	19.359	61,92
6	Kuala Betara	185,89	13.969	75,21
7	Merlung	311,64	16.268	52,20
8	Muara Papalik	336,38	10.486	31,17



9	Pengabuan	440,13	26.654	60,56
10	Renah Mendaluh	473,72	15.882	33,53
11	Seberang Kota	121,28	9.122	75,21
12	Senyerang	426,66	25.357	59,43
13	Tebing Tinggi	342,88	36.531	106,54
TANJUNG JABUNG BARAT		5.009.82	326.530	65,56

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.4. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Betara, Muara Papalik, Renah Mendaluh, Tebing Tinggi, Batang Asam, Merlung dan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :
 - 1) Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Tungkal



- Ilir, Seberang Kota dan Kuala Betara; dan
- 2) Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (*Provinsi Jambi dan Riau*) yang berada di Renah Mendaluh dan Batang Asam. Sebagai Daerah yang terkenal dengan makanan lautnya “*Sea Food*” karena ujung daerahnya sangat berdekatan dengan laut dan berdekatan dengan jalur SIJORI (*Singapura, Johor, Riau*), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpotensi sebagai Daerah Pelabuhan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak di bangun Pelabuhan mulai dari pelabuhan lokal sampai dengan pelabuhan Internasional seperti pelabuhan Roro. Disamping itu pada daerah bahagian daratnya terhampar tanah perkebunan yang sangat luas.





1.2.5. Perekonomian dan Sosial Budaya

Perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bidang – bidang tertentu seperti perekonomian, dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, antara lain terlihat dari indeks pembangunan manusia (*IPM*) yang relatif masih rendah sehingga berdampak pada produktivitas kerja serta masih tingginya kesenjangan ekonomi yang diindikasikan dari angka pengangguran dan tingkat penduduk miskin masih relatif tinggi, angka gini rasio dalam kategori sedang serta iklim investasi yang masih perlu dioptimalkan. Pada bidang Sosial Budaya yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam karena penduduk yang berdomisili dari bermacam suku seperti suku Jawa, Melayu, Bugis, Banjar, Padang, Batak, dan penduduk asli Jambi. Sebagian besar berbudaya melayu dan banjar yang berjalan secara Islami, karena di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas penduduknya beragama Islam.



1.2.6. Keuangan Daerah (*Anggaran*)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Tahun 2023 memperoleh dan menggunakan Anggarannya secara Profesional, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan program – program sebagai berikut :



	PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH(Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	125.609.082.672,00
2	Dana Perimbangan	1.117.214.723.847,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	77.351.418.901,00
JUMLAH TOTAL		1.320.175.225.420

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1.3.1. Kelembagaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah dibentuk pula Susunan Organisasi Perangkat Daerah (*SOPD*) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dengan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap



- pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
 - d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
 - 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan



- dan sub urusan peternakan;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 14) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 15) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub



- urusan kebakaran;
- 16) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 17) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 18) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 19) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - 22) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan; dan
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian,

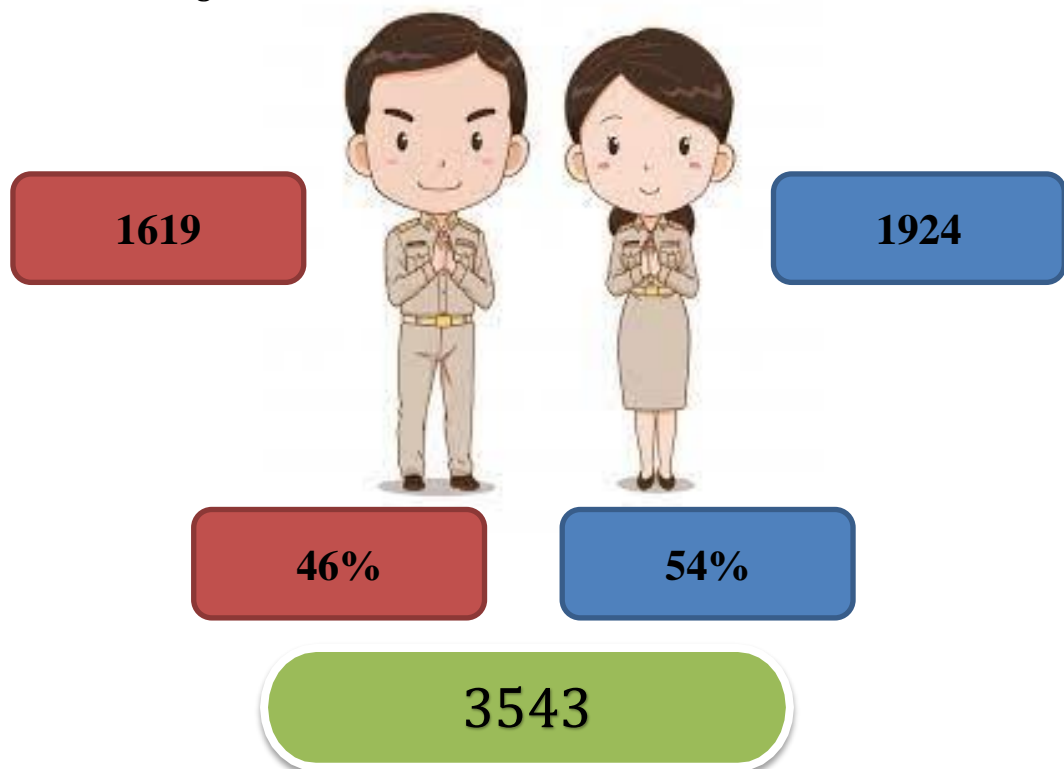


- pendidikan dan pelatihan;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B;
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Tipe C.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Tungkak Ilir dengan Tipe A;
 - 2) Tungkak Ulu dengan Tipe A;
 - 3) Batang Asam dengan Tipe A;
 - 4) Betara dengan Tipe A;
 - 5) Bram Itam dengan Tipe A;
 - 6) Kuala Betara dengan Tipe A;
 - 7) Merlung dengan Tipe A;
 - 8) Muara Papalik dengan Tipe A;
 - 9) Pengabuan dengan Tipe A;
 - 10) Renah Mendaluh dengan Tipe A;
 - 11) Seberang Kota dengan Tipe A;
 - 12) Senyerang dengan Tipe A;
 - 13) Tebing Tinggi dengan Tipe A.

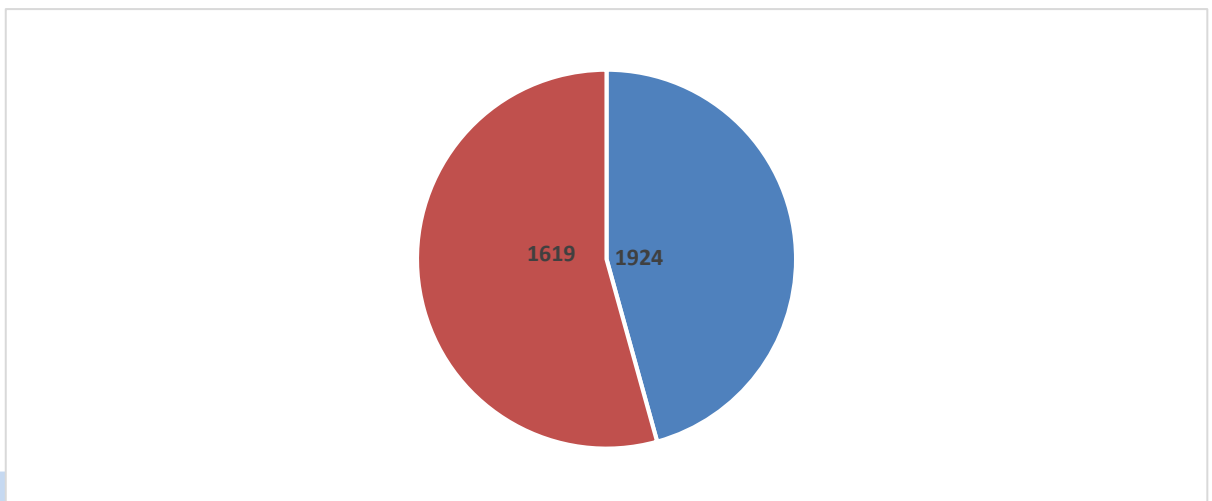


1.3.2. Aparatur Pemerintah Daerah

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan jumlah 3543 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1619 orang dan perempuan sebanyak 1.924 orang.



Grafik 1. Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat





1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1.4.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka Permasalahan dan isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

1.4.1.1. Permasalahan Pokok Derah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

A. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

Akses dan mutu layanan pendidikan usia dini (PAUD), dasar (SD) dan pertama (SMP) yang tidak merata, PAUD, SD, dan SMP tersebar di 13 kecamatan baik di kelurahan maupun desa, sebagian SD, dan SMP terutama yang terletak di desa – desa dengan akses jalan yang buruk dan dengan fasilitas layanan dasar yang minim seperti pada desa – desa yang ada di Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Renah Mendaluh. Tidak meratanya kualitas layanan pendidikan PAUD, SD, dan SMP disebabkan oleh faktor belum tercukupinya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak bagus lagi, dan tidak meratanya



sebaran guru yang berkompetensi. Banyak guru yang berkompetensi mengajar di sekolah – sekolah dalam Kecamatan Tungkal Ilir

2) Bidang Kesehatan

Mutu dan pelayanan kesehatan belum memenuhi standar. Rumah sakit dan puskesmas masih mengalami kekurangan tenaga medis. Selain kekurangan tenaga medis, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal dan RSUD Kahiruddin Suryah-Merlung yang masih tergolong baru masih kekurangan gedung pelayanan kesehatan rawat inap dan instalasi penunjang. Puskesmas – puskesmas yang ada belum menerapkan manajemen perencanaan berbasis ASPAK dalam pemenuhan sarana prasarana, sumber daya kesehatan serta obat-obatan, vaksin serta BMHP untuk pelayanan kesehatan di puskesmas.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, kondisi jalan berdasarkan panjang jalan kabupaten, dengan panjang jalan 1.265 km yang ditetapkan dengan SK Bupati No. 600/707/DPU/2016. Status Jalan Kabupaten tahun 2022 dengan kondisi baik masih terbilang rendah yaitu sebesar 19,18%, dalam kondisi sedang sebesar 23,94%, dalam kondisi rusak sebesar 18,99% dan dalam kondisi rusak berat sebesar 37,90%.
- Masih terdapat dua Ibu kota kecamatan yang belum dapat diakses oleh kendaraan roda empat, yaitu Kec. Kuala Betara dan Kec. Seberang Kota.
- Belum optimalnya distribusi air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini terlihat dari tabel...Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan Tahun 2021. Sampai tahun 2021 ini masih terdapat



empat kecamatan yang belum mendapatkan layanan air bersih perpipaan (PDAM)

Table 4. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan		
	Nilai Value (Rp)	Air Disalurkan Distributed Water (m3)	Pelanggan Number of Customers
	2021	2021	2021
Tungkal Ulu	23,536,200.00	9,529	672
Merlung	442,271,150.00	15,687	771
Batang Asam	37,323,300.00	11,829	640
Tebing Tinggi	50,034,900.00	14,467	927
Renah Mendaluh	18,646,900.00	7,488	475
Muara Papalik	16,740,750.00	6,596	366
Pangabuan	41,913,900.00	15,949	959
Senyerang	5,358,900.00	2,330	176
Tungkal Ilir	197,941,800.00	55,970	6,131
Bram Itam	-	-	-
Seberang Kota	-	-	-
Betara	-	-	-
Kuala Betara	-	-	-
Tanjung Jabung Barat	418,943,590.00	139,775	10,640

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023



4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di perkotaan, Berdasarkan SK Bupati Nomor 438/Kep.Bup/Bappeda.2017 tentang Penetapan Lokasi Perkumuhan Dan Permukiman Kumuh, teridentifikasi dua kecamatan yang memiliki kawasan permukiman kumuh yaitu Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Bram Itam, dengan luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 255,2 Ha. Pada tahun 2023 luasan kawasan permukiman kumuh masih tersisa sebesar 126,5 Ha.
- Salah satu upaya untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2023 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Tanjabbar untuk pertama kalinya melaksanakan program bedah rumah sebanyak 120 rumah dimana sebanyak 50 rumah berada di kawasan kumuh yang dananya bersumber dari APBD Pemkab Tanjabbar dan berharap program ini bisa terus berkelanjutan.

5) Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

- Kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan – perundang-undangan dan norma yang berlaku, terakhir dalam tahun 2023, terdapat 812 kasus dalam program/kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan , pelaksanaan patroli serta terdapat 106 kasus dalam program/kegiatan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari



tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6) Bidang Sosial.

Banyaknya jumlah/jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab. Tanjung Jabung Barat, jumlah/jenis PPKS terbanyak adalah fakir miskin (26.960 jiwa) kemudian lanjut usia terlantar (11.198 jiwa), dari jumlah tersebut untuk PPKS jenis fakir miskin baru terlayani sekitar 16.933 atau 62.80%. sedangkan PPKS jenis usia lanjut terlantar baru terlayani sekitar 1.718 jiwa atau 15,3%. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial untuk PPKS jenis penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, dan anak jalanan juga masih terbilang sangat kecil.

B. Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja, banyak tenaga kerja baik dari tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau dari penduduk yang ingin bekerja tidak memiliki keahlian atau keterampilan. Penduduk laki - laki maupun perempuan kebanyakan bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian yaitu sebesar 54%, sisanya pada lapangan pekerjaan jasa 35% dan lapangan pekerjaan manufaktur 11%. Porsi terbesar orang yang bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian bekerja pada jenis buruh tani yang tidak memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu, dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik.



2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Masih terdapat kesenjangan kesetaraan gender antara laki - laki dan perempuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar 86,17%.
- Pemenuhan hak - hak anak belum optimal, Tahun 2020 berdasarkan kriteria capaian indikator - indikator Kota Layak Anak (KLA) masih belum mencapai status pratama, diantara indikator-indikator KLA tersebut yang masih belum dapat dipenuhi seperti Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya, Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya, Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, dan lainnya.

3) Bidang Pangan

Rendahnya mutu beras, beras hasil produksi pertanian Kab. Tanjung Jabung Barat tidak banyak diminati masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat sendiri begitu juga Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tidak banyak menyerap beras local dikarenakan tidak memenuhi standar kualitas. Penanganan padi pasca produksi sangat mempengaruhi mutu beras, kurangnya sarana dan prasarana seperti



trasher, lantai jemur, Rice Milling Unit dan rumahnya akan mengurangi mutu beras.

4) Bidang Lingkungan Hidup

- Kualitas lingkungan hidup Kab. Tanjung Jabung Barat dinilai dari kualitas air udara. dan tutupan lahan. Hasil pengukuran kualitas air sungai di tahun 2020 berada pada klasifikasi “sedang” atau kelas III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Sedangkan hasil pengukuran kualitas udara berada pada klasifikasi “Baik”, dan kualitas tutupan lahan mengalami penurunan setiap tahunnya, secara umum penurunan kualitas tutupan lahan disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan hijau akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur yang mana tak sebanding bertambahnya luas tutupan melalui aktivitas penghijauan.
- Belum maksimalnya pelayanan penanganan sampah di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Pelayanan maksimal baru hanya di 1 kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Tungkal Ilir
 - Pelayanan manual di 4 kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Muara Papalik
 2. Kecamatan Merlung
 3. Kecamatan Tungkal Ulu
 4. Kecamatan Tebing Tinggi
 - Belum dilayani dalam penanganan sampah di 8 kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Bram Itam
 2. Kecamatan Kuala Betara
 3. Kecamatan Betara
 4. Kecamatan Pengabuan
 5. Kecamatan Senyerang
 6. Kecamatan Seberang Kota
 7. Kecamatan Batang Asam
 8. Kecamatan Renah Mendaluh



Jumlah timbunan sampah rumah tangga dan dunia usaha semakin bertambah setiap tahunnya disebabkan: Bertambahnya jumlah penduduk, perluasan daerah pemukiman penduduk, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya sementara Sarana dan prasarana dalam penanganan sampah tidak memadai seperti kendaraan operasional yang sudah tua, tempat pembuangan sampah sementara yang letaknya tidak strategis, kurangnya tong sampah, kemudian program tidak berjalan maksimal dalam penanganan sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

5) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil- Kuala Tungkal, seperti penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Kec Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, dan Renah Mendaluh, serta Kec. Senyerang cukup mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipilnya, faktor waktu/lama mengurus, harus menunggu giliran, kurang bahan administrasi yang dipersyaratkan akibat ketidaktahuan, dan tidak mempunyai tempat untuk menginap apabila pengurusan tidak selesai dalam satu hari serta kehabisan material/bahan cetak administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat.

6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa di Kab. Tanjung Jabung Barat dengan status desa berkembang masih cukup banyak yaitu berjumlah 91 desa, dan masih terdapat 2 desa dengan status desa tertinggal yaitu desa



Dataran Kempas dan Lubuk Lawas, sedangkan desa dengan status desa maju berjumlah 18 desa, dan desa dengan status desa mandiri berjumlah 3 desa. Indikasinya bahwa 131 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen – komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Maju. Beberapa penyebabnya yaitu Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa.

7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) masih tinggi yaitu 50,80 per 1.000 perempuan, beberapa faktor penyebabnya yaitu perkawinan pada usia dini dan rendahnya pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS). Kelahiran pada usia remaja bila tidak terkendali dengan baik oleh kedua pasangan sebagai orang tua maka dapat mengakibatkan dampak buruk terutama bagi perkembangan anak dan atau keberlangsungan rumah tangga.

8) Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum optimal, kondisi geografis Kab. Tanjung Jabung Barat di sebagian wilayah timur terdapat banyak sungai – sungai baik besar maupun kecil yang memisahkan desa dan atau kecamatan. Untuk menghubungkan dengan baik antar desa/kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat masih Banyak diperlukan dermaga / halte sungai, selain itu kondisi sekarang dermaga / halte sungai sebagian dalam kondisi rusak.



9) Bidang Komunikasi dan Informatika

Masih terdapat desa – desa yang belum mendapat akses layanan telekomunikasi atau sangat kurang, yaitu ada sekitar 54 desa yang terbagi di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Pemenuhan akses layanan telekomunikasi ini sangat bergantung pada pihak swasta (perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi), untuk itu perlu dukungan dan dorongan dari Pemerintah Daerah agar pemangku kepentingan mau meluaskan jaringan telekomunikasinya hingga menjangkau desa – desa yang dimaksud diatas.

10) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi tidak aktif cukup banyak, dari sekitar 417 koperasi yang terdaftar hanya sebesar 56% koperasi yang aktif atau sekitar 233 koperasi aktif, jumlah ini hampir setengahnya dari jumlah koperasi yang terdaftar. Beberapa penyebab koperasi menjadi tidak aktif yaitu dikarenakan tidak adanya usaha koperasi, kurangnya kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi, dan rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan keuangan koperasi.

11) Bidang Penanaman Modal

Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menarik minat investor masih belum cukup, semua kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk dikelola, namun perlu adanya sarana/prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mempermudah berjalannya kegiatan investasi, sarana/prasarana tersebut berupa jalan, jembatan, dermaga, dan lainnya.



12) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Masih sedikitnya kegiatan pembinaan kepemudaan oleh Pemerintah daerah, dari 29 organisasi kepemudaan yang terdata di Kab. Tanjung Jabung Barat, hanya ada sekitar 9 organisasi yang aktif atau sekitar 30 persennya, seluruh organisasi kepemudaan terdiri atas pemuda, yang mana diketahui bahwa sifat dan sikap pemuda cenderung labil maka perlu pembinaan jangka panjang.
- Masih rendahnya perolehan medali pada kejuaraan olahraga.

13) Bidang Kebudayaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman bisa menjadi kekuatan bisa juga menjadi kelemahan bagi pembangunan daerah, kebudayaan seharusnya mampu mendukung proses pembangunan bukan sebaliknya. Disisi lain di era globalisasi, dengan tidak terbendungnya lagi arus informasi dari dunia luar menyebabkan jati diri dan karakter bangsa semakin tergerus, perlu melakukan pelestarian dan perlindungan budaya daerah.

14) Bidang Statistik

Sistem Satu Data daerah belum berjalan, data – data dan informasi yang di tampilkan tidak melalui prosedur sistem satu data, ini memungkinkan terjadi ketidakakurasian data/informasi yang disampaikan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, akibatnya perencanaan yang kurang tepat. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data



Indonesia mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan.

15) Bidang Perpustakaan

Rendahnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan, sebagian besar pengunjung perpustakaan daerah Kab. Tanjung Jabung Barat adalah mahasiswa dan pelajar, yang berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan mencari materi penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru. Hanya sebagian kecil pengunjung perpustakaan yang bukan mahasiswa atau pelajar, ini bisa menandakan budaya gemar membaca masyarakat masih rendah.

16) Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip secara digital atau elektronik masih belum optimal, sebagian besar penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan secara konvensional atau berbentuk fisik. Seharusnya dokumen atau arsip yang biasanya disimpan berbentuk fisik juga harus disimpan secara digital atau elektronik. Arsip yang sudah berbentuk digital lebih efisien, tak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan khusus, jauh dari resiko kerusakan, kemudahan pelayanan baik kepada pemilik, pengelola, dan konsumen. Sekarang ini dokumen atau arsip lainnya yang ada sekarang terus banyak dan menumpuk sehingga menimbulkan persoalan, selain itu kemungkinan besar dokumen/arsip yang biasanya dalam bentuk kertas usang, robek, lusuh dan tak jelas.

C. Urusan Pemerintah Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya masih rendah, pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya Kab. Tanjung Jabung



Barat berjumlah sekitar 1.135 ton, jumlah produksi tersebut tidak sebanding dengan potensi perikanan budidaya yang ada. Potensi perikanan budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari perikanan budidaya tambak dan budidaya kolam. Potensi pengembangan tambak di Kab. Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan tambak. Sedangkan potensi budidaya kolam di Kab. Tanjung Jabung Barat diperkirakan sejumlah 2.000 Ha tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

2) Bidang Pariwisata

Pengembangan potensi wisata belum optimal, beberapa potensi wisata seperti wisata mangrove Pangkal Babu, pemandian air panas, Wisata rawa Jembatan Karindangan, Sukorejo di Pematang Buluh Kecamatan Betara; Air terjun Pehlang, Danau Jabung dan danau Cermin Kecamatan Tungkal Ulu; Danau Payo Lebar di Kecamatan Merlung; Air terjun Ratu Calista Irawan (Air terjun Lubuk Bernai), air terjun Gemuruh,



air terjun Bukit Pianang Bawah, dan Air Terjun Suban di Kecamatan Batang Asam; Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, air terjun Bukit Kautsar, air terjun Danau Alo, danau biru, air terjun Tembulun, air terjun lampirin Kecamatan Renah Mendaluh; kurang mendapat perhatian, berupa penyediaan sarana/prasarana objek wisata, infrastruktur jalan/jembatan untuk akses menuju objek wisata, dan penyediaan sumber daya manusia kepariwisataan.

3) Bidang Pertanian

Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2023, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai +9.556 Ha. Terakhir pada tahun 2023 luas lahan baku sawah sebesar 8.879 ha menurun dari luas 18.435 ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun. Salah satu upaya menambah kembali luas lahan pertanian tanaman pangan adalah dengan membuka baru lahan pertanian melalui program cetak sawah baru.

Disamping itu sebagian besar tanggul – tanggul yang berfungsi untuk pengairan pertanian/perkebunan mengalami kedangkalan dan penyempitan sehingga tidak berfungsi secara normal, yang dampaknya terhadap produktivitas hasil pertanian/perkebunan.

4) Bidang Perdagangan

Belum tersedianya unit penera alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di Kab. Tanjung Jabung Barat, karena belum dibentuk unit kerja yang menangani



bidang metrologi legal. Sampai saat peneraan UTTP dilakukan di Kota Jambi atau dengan mendatangkan petugas penera. Selain tujuan peneraan untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada pedagang pasar tradisional dalam hal mengukur, menakar dan menimbang pada kegiatan jual beli, juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah.

5) Bidang Perindustrian

Rendahnya daya saing produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Terbukanya pasar bagi pelaku usaha yang ingin berbisnis tentunya akan menjadi tekanan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah Kab. Tanjung Jabung Barat (lokal), produk dengan kualitas bagus dan harga yang lebih rendah sudah barang pasti menjadi daya tarik bagi pembeli. Beberapa penyebab rendahnya daya saing produk usaha industri kecil dan menengah (IKM) lokalyaitu SDM yang terampil masih minim, rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku IKM, dan kurangnya pemasaran / tidak memanfaatkan media elektronik.

6) Bidang Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal, dengan bergantinya peraturan perundang – undangan mengenai perencanaan serta penggunaan sistem perencanaan berbasis aplikasi (SIPD) yang efektif/mutlak dilaksanakan ditahun 2023 ini.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar baru bagi perencanaan daerah dalam memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan diinputkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Semua pihak terkait perlu penyesuaian dan



pembelajaran dalam penerapannya sehingga butuh waktu dan mengalami beberapa kendala.

7) Bidang Kepegawaian

Rendahnya profesionalitas ASN Kab. Tanjung Jabung Barat, ditunjukkan dengan angka indeks profesionalitas ASN sebesar 59,0 (kategori sangat rendah), beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya profesionalitas seperti data – data individu ASN tidak semua terinput di SAPK, kesadaran ASN untuk berdisiplin rendah, kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan kedisiplinan. kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN, adanya budaya kerja bermalasan sudah tertanam dilingkungan kerja, dan rendahnya minat pegawai untuk mengikuti diklat structural.

8) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Rendahnya minat ASN untuk mengikuti diklat struktural, dan ASN dengan jabatan fungsional tidak bisa sesegera mendapatkan diklat fungsionalnya karena kuota peserta diklat disediakan penyelenggara terbatas.

9) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sedikit sekali kegiatan penelitian dan atau pengembangan yang di lokuskan dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat, baik dari unit kerja yang membidangnya (Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat) maupun dari instansi/lembaga luar daerah.

Tidak tersedianya tenaga fungsional peneliti (ada satu tenaga fungsional peneliti di Bappeda, tetapi sekarang ini statusnya tidak aktif) dan minimnya dukungan anggaran adalah merupakan beberapa penyebab permasalahan penelitian dan pengembangan di Kab. Tanjung Jabung Barat.



1.4.1.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

a. Isu Tingkat Internasional

1. Saat ini, dunia sedang menghadapi triple krisis planet yaitu perubahan iklim, polusi & pencemaran, serta percepatan kehilangan biodiversitas. KLHS penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, dan menjadi integral dari perencanaan dan implementasi pembangunan.

2. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Adapun 17 tujuan SDG's tersebut sebagai berikut :

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau



8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, Industri, dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) (5 tahunan). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelaraskan rencana kerja RAD dengan RPJMD guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

*Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8



persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.*

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung ini, perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kerangka peraturan sebagai upaya mengadopsi kemajuan teknologi digital agar Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

b. Isu Tingkat Regional / Asean

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), adalah merupakan perjanjian bersama negara – negara ASEAN, dengan tujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Walaupun MEA sudah berjalan hampir lima tahun sejak diberlakukan diawal tahun 2016. Secara analisis, dengan diberlakukannya MEA, tentu terdapat dampak positif dan negatif terhadap Indonesia begitu juga terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Beberapa dampak positif :

1. Dari sisi perdagangan, dapat mengurangi hambatan – hambatan perdagangan bahkan tidak ada hambatan, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan pangsa pasar dan volume ekspor.
2. Dari sisi investasi, menimbulkan ketertarikan minat investor untuk berinvestasi (*foreign direct investment*), ini akan menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi.



3. Dari sisi ketenagakerjaan, selain penciptaan lapangan kerja baru, akses kerja ke luar negeri (negara – negara anggota ASEAN) lebih mudah.

Beberapa dampak negatif :

1. Sisi daya saing, dengan masuknya barang – barang luar negeri dalam jumlah banyak, dapat mengancam produk – produk industri lokal yang kualitas dan harganya dibawah kualitas barang – barang luar negeri.
2. Sisi ketenagakerjaan, dari sisi ketenagakerjaan selain terdapat sisi positifnya ada juga sisi negatifnya, dimana tenaga kerja / SDM di beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina mempunyai kualitas, ini memudahkan tenaga asing tersebut diterima menjadi pekerja di Indonesia.
3. Eksploitasi sumber daya alam (SDA), negara Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang masih melimpah, dengan kemudahan berinvestasi akan sangat menarik minat investor bidang pertambangan, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lainnya untuk memanfaatkan SDA yang tersedia.

c. Tingkat Nasional

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing



- 4) Membangun budaya dan karakter bangsa
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Table 5. Indikator Sasaran Makro Pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024

No.	Indikator Sasaran Makro Pembangunan	Target
1	Rata - rata peningkatan pertumbuhan ekonomi pertahun	4% - 6,0% pertahun
2	PDB per kapita (akhir tahun 2024)	5,780 - 6,160 USD
3	Tingkat kemiskinan (akhir tahun 2024)	65% - 7,0%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (akhir tahun 2024)	4,0% - 4,6%
5	Rasio Gini (akhir tahun 2024)	0,370 - 0,374
6	Indeks Pembangunan Manusia (akhir tahun 2024)	75,54
7	Tingkat inflasi (2020 - 2024)	2,0 - 4,0 persen
8	Tingkat investasi (2020 - 2024)	6,9% - 8,1%
9	Pertumbuhan ekspor non migas (2020 - 2024)	9,2% - 11,4%
10	Share industri pengolahan (akhir tahun 2024)	20,1% - 21,3%
11	Pertumbuhan industri pengolahan non migas (2020 - 2024)	5,8% - 7,6%
12	Defisit transaksi berjalan (2020 - 2024)	2,2% - 1,8% PDB

Sumber : Narasi RPJMN 2020 – 2024 (Revisi)

Dalam pencapaian target sasaran makro pembangunan tersebut diatas perlu mendapat dukungan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten. Upaya - upaya dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui sinkronisasi sasaran pembangunan nasional dengan sasaran kabupaten, yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

**Table 6. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera**

No	Prioritas Nasional	Major Project	Manfaat Proyek
1	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan Menjamin	1. Integrasi pembangunan wilayah Batam-Bintan	Pengembangan Kawasan Batam-Bintan bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata guna meningkatkan daya saing wilayah.
		2. Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar)	Pengembangan wilayah Metropolitan Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional, serta meningkatkan pembangunan di Selatan Sumatera
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan Tol Trans Sumatera	1. Menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh-Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam 2. Menjadi enabler bagi perkembangan 6 Kawasan Industri (KI Dumai, KI Jambi Kemingking, KI Tenayan, KI Way Pisang, KI Sei Mangkei, KITanjung Api-Api)

Sumber : Narasi RPJMN 2020 – 2024 (Revisi)

d. Tingkat Provinsi

Pada tahun 2021 penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan bersamaan waktunya dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 akan memperhatikan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Adapun visi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah



dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT", dengan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata kelola Pemerintah
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa pokok bahasan yang terkait dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan ekonomi Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak) (Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan prioritas pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi;
2. Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang sebagai strategi dalam mendukung pencapaian Misi 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah;
3. Pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN adalah merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Penetapan kawasan lindung melalui Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Sarolangun, untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan adalah juga merupakan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi:



5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan, adalah arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada;
6. Mendorong/fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kelagian Tungkal Ulu, sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jambi di tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

e. Tingkat Kabupaten

1. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 10,26%, kemiskinan perlu ditangani secara serius dan komprehensif oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
Permasalahan kemiskinan yang terlalu lama akan menimbulkan permasalahan sosial baru, seperti memicu terjadinya tindak kriminal, tingkat pengangguran bertambah, kemunduran kualitas SDM karena banyak yang tidak mampu bersekolah lebih tinggi, dan angka kematian meningkat karena rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Perluasan akses pendidikan, percepatan pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan tata kelola pendidikan. Seiring perkembangan pembangunan daerah dan terus bertambahnya jumlah penduduk terutama di desa – desa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah sekolah dan guru. Banyak permukiman penduduk baru terbentuk dengan sendirinya yang jauh dari akses pendidikan, dan sekolah yang ada di desa – desa dalam keadaan



kekurangan guru, ini memberikan dampak buruk terhadap kualitas pendidikan di desa.

3. Pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat

Layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat menjadi tuntutan dasar bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat, dari masyarakat yang tinggal di perkotaan hingga yang tinggal di pelosok desa membutuhkan layanan kesehatan. Terdapat 2 rumah sakit umum daerah, dan 16 puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan. Keberadaan puskesmas secara rasio telah memenuhi cakupan pelayanan kesehatan namun berbeda halnya dengan kecukupan tenaga dokter yang belum terpenuhi, capaian terakhir di tahun 2020 rasio dokter per 2500 penduduk yaitu 0,67 bila dibandingkan dengan rasio Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yaitu 1 dokter : 2500 penduduk maka capaian tersebut masih sangat jauh

4. Belum terpenuhinya layanan dasar air bersih bagi masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat, kesulitan mendapatkan air bersih tentu menjadi beban bagi masyarakat, keterbatasan penggunaan air bersih dalam rumah tangga dapat mengganggu berkehidupan rumah tangga, serta memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

5. Pembangunan ruas jalan tolJ ambi – Rengat melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban).

Dengan Interchange berada di Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan



Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.

6. Untuk wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat atau 13 kecamatan, baru terdapat 2 pos pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan (dalam wilayah manajemen kebakaran), yaitu di Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Pengabuan. Sejalan bertambahnya jumlah penduduk akan bertambahnya permukiman penduduk, maka resiko kebakaran dan korban kebakaran (harta benda maupun jiwa) akan semakin besar juga. Untuk itu sangat diperlukan pos pelayanan pemadam kebakaran disetiap wilayah kota kecamatan.
7. Masih terdapat desa – desa yang belum mendapat akses layanan telekomunikasi atau sangat kurang, yaitu ada sekitar 54 desa yang terbagi di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang. Desa – desa yang tidak terdapat akses layanan telekomunikasi akan mengalami kelambatan dalam perkembangannya, terutama pada sektor perdagangan dan sektor pendidikan.
8. Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kab. Tanjung Jabung Barat yang masih terbilang banyak, keberadaan PPKS seperti anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar, fakir miskin, pengemis, tuna susila serta lainnya perlu penanganan. Dengan semakin bertambahnya populasi PPKS sudah pasti memunculkan permasalahan baru, seperti meningkatnya potensi



terjadinya tindak kejahatan, menularkan pengaruh buruk kepada orang lain, memperburuk keindahan tata kota, dan lainnya.

9. Konflik lahan, konflik lahan yang sampai ini masih terus muncul, dan beberapa kasus konflik lahan berkepanjangan dan masih belum terselesaikan. Mayoritas konflik lahan melibatkan orang dalam jumlah banyak, yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, perusahaan, dan organisasi masyarakat. Kasus konflik lahan yang lambat ditanganidapat bergejolak hingga pertikaian, yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan daerah dan menghambat pembangunan.
10. Jumlah timbunan sampah rumah tangga dan dunia usaha semakin bertambah setiap tahunnya, disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, perluasan daerah pemukiman penduduk, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Sementara, sarana dan prasarana dalam penanganan sampah tidak memadai
11. Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks, mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial dan budaya, seperti memicu timbulnya sumber penyakit, pencemaran lingkungan, merusak keindahan dan kenyamanan lingkungan, menghambat perkembangan pembangunan daerah, dan lainnya.
12. Masih cukup luasnya permukiman kumuh dalam kawasan perkotaan Kuala Tungkal, penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, terdapat banyak permasalahan permukiman kumuh seperti penumpukan sampah, sanitasi yang buruk, kecenderungan membentuk perilaku buruk, dan rendahnya



tingkat kesehatan. Keberadaan permukiman kumuh dapat memberikan dampak buruk pada perkembangan sosial dan produktivitas kota.

13. Berkurangnya lahan-lahan pertanian tanaman pangan oleh aktivitas ekonomi masyarakat terutama untuk pengembangan lahan perkebunan, permukiman, pembangunan infrastruktur ataupun industri. Data statistik pertanian menunjukkan bahwa selama tahun 2013 s/d 2020, terjadi konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun lahan non pertanian mencapai ± 9.824 Ha. Terakhir pada tahun 2020 luas lahan baku sawah sebesar 8.611 Ha menurun dari luas 18.435 Ha di tahun 2013, dampaknya produksi padi juga ikut menurun.
14. Isu Pertanian yang saat ini sedang mengemuka dan menjadi program strategis nasional adalah konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan pada suatu kawasan yang terpilih dan ditetapkan. Melalui konsep *Food Estate* ini penanganan program dan kegiatan dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi pada semua sektor yang dilibatkan. Dengan padi sebagai produk utama serta produk-produk perkebunan dan peternakan sebagai produk pendukung.

Food estate yang merupakan program strategis nasional mensyaratkan penanganan secara terintegrasi. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ditangani secara sinergis sehingga maksud untuk mewujudkan dan menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang dapat terwujud. Penanganan terhadap sarana dan prasarana naiknya produksi baik pertanian, perkebunan maupun peternakan merupakan sesuatu yang harus dilakukan segera.



Perbaikan tanggul, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah baru dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi yang tepat akan menjadi perhatian masa lima tahun ke depan.

Permintaan akan daging setiap tahun terus meningkat baik untuk kebutuhan dalam daerah maupun dari luar daerah. Maksud menjadikan Tanjung Jabung Barat menjadi sentra penghasil sapi baik untuk bakalan ternak maupun daging, di laksanakan melalui kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) melalui inseminasi buatan (Kawin Suntik) terhadap betina produktif diharapkan anak anak hasil IB bisa membantu meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

f. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat 2021-2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan diperoleh dari hasil identifikasi dan perumusan dengan metode pembobotan yang paling sedikit berkaitan dengan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- 5) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;



- 6) Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- 7) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 8) Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakatserta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- 9) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- 10) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yangdilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Hasil identifikasi dan perumusanisu startegis Pembangunan Berkelanjutan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinilai memiliki pengaruh yang besaradalah;

- 1) Permasalahan Limbah
- 2) Permasalahan Sanitasi
- 3) Permasalahan DAS dan Drainase
- 4) Aksesibilitas Infrastruktur
- 5) Kurangnya Kualitas SDM
- 6) Pengembangan Industri dan Eco Wisata
- 7) Perlindungan Kawasan Strategis dan Rawan Bencana

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi



masyarakat dengan prinsip - prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan



berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai - nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksa. Pengukurankinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah.

Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan - perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *SAKIP* ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang memiliki tujuan esensi dari SAKIP bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (*program dan kegiatan*) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut akan dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud SAKIP. SAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam Akuntabilitas Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2023. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada



indikator.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- ❑ Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan Ikhtisar.
- ❑ Bab I Pendahuluan berisi latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Tanjab Barat, kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- ❑ Bab II Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan rencana strategis dan rencana kinerja / perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.
- ❑ Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja, analisa dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Realisasi Anggaran.
- ❑ Bab IV Penutup berisi kesimpulan kinerja Tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Terkait RPJMD, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2.2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2021-2026 dan



merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH BERKAH

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “**Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah**” yang dideskripsikan sebagai berikut:

- **BERKUALITAS**, Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.
- **Ekonomi maju**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **Religius**, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **Kompetitif**, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- **Aman**, Suasanaaman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.



- **H**armonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat

2.2.2. MISI

Dari pernyataan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, dirumuskan 5 (*Lima*) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun 5 misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

2.2.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 2021-2026 tahun kedepan adalah

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan



- dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

2.2.4. SASARAN

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut yakni :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan
8. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
9. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota

Berikut Penjabaran misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator target dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel dibawah ini :


Table 7. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2026
MISI I	TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47
MISI II	TUJUAN 2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman	73,50
MISI III	TUJUAN 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	59,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,76
		Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
MISI IV	TUJUAN 4	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,00%
		Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	70,00
MISI V	TUJUAN 5	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,250
			Indeks Infrastruktur	73.19



2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam DPA (*Dokumen Pelaksanaan Anggaran*) dan telah mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur pemerintah daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata pemerintahan yang baik, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh



kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, dari kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Table 8. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang / Urusan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesejahteraan Rakyat • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Tenaga Kerja • Kepemudaan dan Olahraga, Kepegawaian
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	2. Indeks Ketentraman	$IK = \frac{\text{Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentraman dan Ketertiban Umum • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Perlindungan Masyarakat • Kesatuan Bangsa dan Politik • Sosial
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Komponen Pengungkit + Komponen hasil.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengawasan • Keuangan • Bagian Organisasi
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	4. Nilai SAKIP Kabupaten	30 % (Perencanaan) + 30 % (Pengukuran) + 15 % (Pelaporan) + 25 % (Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Perencanaan • Bagian Organisasi
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal • Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Keuangan • Kesehatan
6	Meningkatnya kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan	6. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan



	Aset Daerah			
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	7. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan • Koperasi, Usaha Kecil dan menengah • Penanaman Modal • Perikanan • Kepemudaan dan olahraga • Pertanian • Bagian Ekonomi.
8	Terjaganya Kelestarian lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA+IPU+ITH}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan hidup • Kesehatan
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	9. Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p><i>f_i</i>=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i. <i>Y_i</i>=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perhubungan.
		10. Indeks Infrastruktur	$II = (25\% \times RT \text{ akses air bersih}) + (25\% \times RT \text{ akses sanitasi}) + (25\% \times RT \text{ akses listrik}) + (25\% \times RT \text{ akses telepon})$	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kominfo • Bagian Sumber Daya Alam.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam



pengawasan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tugas pokok yaitu “*Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan perangkat daerah*”, yang merupakan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 44 (empat Puluh empat) jumlah perangkat daerah yang terdiri dari 31 dinas/badan dan 13 Kecamatan. Di dalam indikator kinerja utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak semua Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap IKU tersebut. Dari 44 Perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak 23 OPD yang memiliki bidang/urusan sebagai penunjang sasaran strategis dari IKU Kabupaten sedangkan 8 dinas/badan dan 13 kecamatan sebagai pendukung tercapainya sasaran strategis dan IKU Kab. Tanjung Jabung Barat.

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



TABEL. 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2023 KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

Table 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,50
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat	Nilai Ketentraman	62,00
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	53.00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	64.01
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,70
6	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,50%
8	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,70
9	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,28
		Indeks Infrastruktur	67.85



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

KUALA TUNGKAL 2 Februari 2022



Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam me-reviu kinerja organisasi pemerintah.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja



yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut

Table 10. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - \geq 100	Sangat Tinggi	■
2	76 - 90	Tinggi	■
3	66 - 75	Sedang	■
4	51 - 65	Rendah	■
5	\leq 50	Sangat Rendah	■

3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di atas selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pencapaian IKU Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2023 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



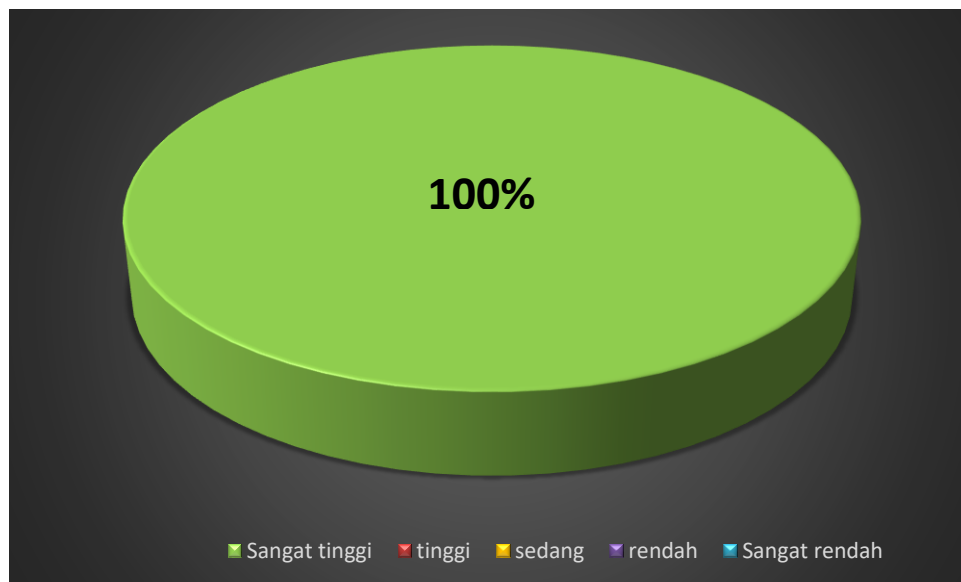
Table 11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja awal RPJMD	2023			Target Akhir (2026)	Capaian s/d 2021 terhadap Targer Akhir 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	67,54	68,50	71.44	104,28	69,47	102,83
2	Indeks Ketentraman	N/A	84.01	86.64	103.13	73,50	115.15
3	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	47,88	53,00	49,73	93.83	59,00	84.28
4	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	56,57	64,01	62.02	96,89	72,00	86.13
5	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	80,66	80,70	79.98	99.10	80,76	99.03
6	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
7	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	0,64%	2,50%	3,51	140,4	4,00%	84
8	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	68,22	68,70	72,69	105.80	70,00	103.84
9	<i>Indeks Gini</i>	0,281	0,28	0,32	114,28	0,250	126.4
10	<i>Indeks Infrastruktur</i>	62,15	67,85	79,27	116,83	73.19	108,3



Dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian s/d 2023 terhadap Target Akhir 2026 (%) di atas, semua indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menunjukkan capaian kinerja 100% atau lebih . Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan dan kerja keras serta komitmen dari Bupati Tanjung Jabung Barat dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel diatas maka, 10 indikator (100%) masuk dalam kategori Sangat Baaik . Jika dilihat dari pencapaian diatas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah bekerja secara maksimal. Walaupun demikian Pemkab Tanjung Jabung Barat tetap melakukan perbaikan-perbaikan guna untuk terus meningkatkan kinerja sehingga berdampak lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2. Capaian Kinerja Tahun 2023





3.2. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja dari 9 (*Sembilan*) sasaran strategis yang dilihat dari indikator kerjanya masing- masing.

SS 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

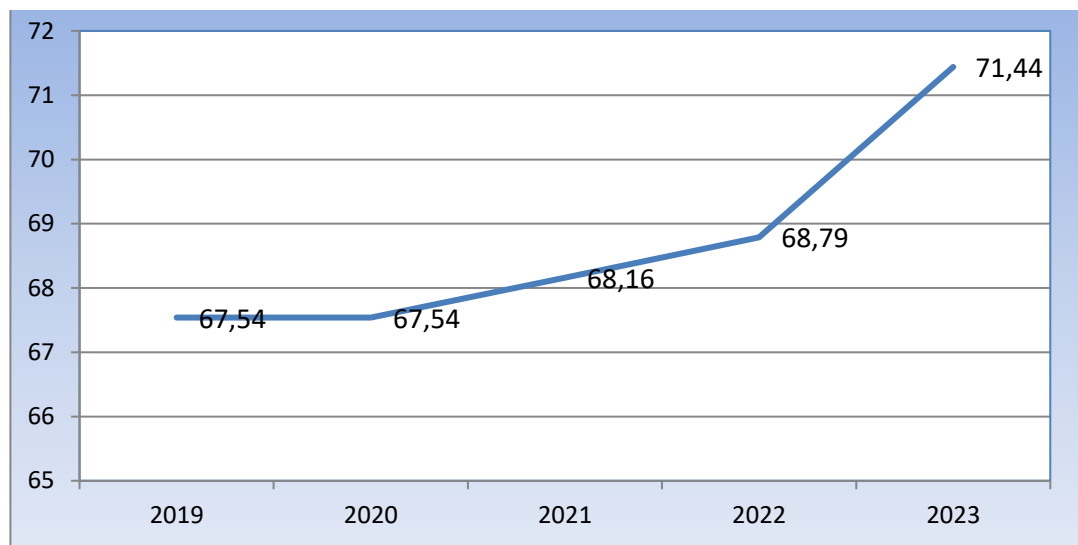


Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Table 12. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,54	67,54	68,16	68,79	68,50	71.44	104,28	69,47
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : Tanjung Jabung Barat dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kab. Tanjung Jabung Barat.

**Grafik 3. Indek Pembangunan Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, metodologi penghitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sejak 2014 sampai dengan sekarang IPM menggunakan metode terbaru dalam pengukurannya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun. Untuk Provinsi Jambi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi tahun 2023 mencapai 73,73, meningkat 0,62 poin (0,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,11). Selama 2020–2023, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 71,44% melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 68,50. yang mengalami kenaikan sebesar 0,56% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 68,79%. Jika dilihat dari tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menetapkan target IPM tahun 2023 lebih rendah dari pada capaian kinerja tahun 2022 yaitu 68,79, hal ini disebabkan target-target tersebut telah tertuang didalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, sehingga dalam menetapkan target pertahunnya Pemerintah Kab. Tanjung Jabung barat mengacu kepada RPJMD agar terdapat sinkronisasi antara target- target yang ada di RPJMD dan LKJIP. Meningkatnya IPM menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Tanjung Jabung Barat dilihat dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.



a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan berdampak positif terhadap meningkatnya kualitas hidup sebahagian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditunjukan dengan meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup setiap tahunnya. Dimensi umur panjang dan sehat ditunjukkan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), UHH Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sebesar 73,21 meningkat sebesar 6,55 poin atau sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Terselenggaranya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022, melalui Program berobat gratis telah diluncurkan kartu berobat gratis, sebanyak 633 kartu diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan belum mendapat bantuan kesehatan dari pemerintah pusat Selain itu melalui Program Berobat Gratis juga telah diintegrasikan sebanyak 12.858 masyarakat miskin dan tidak mampu kedalam BPJS Kesehatan. Aksi program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), pelayanan pemeriksaan ibu hamil secara berkala, pelayanan pasca persalinan / kelahiran, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI). Menetapkan standar puskesmas dengan minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter / dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan





masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologilaboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Mengadakan program Ploraris bagi masyarakat lansia berbentuk kegiatan senam dan pemeriksaan rutin bagi masyarakat usia 60 keatas.

b. Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

IPM dengan Metode Baru dari dimensi Pendidikanmemasukan idnikator rata - rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam

pendidikan dan perubahan yang terjadi. Rata - rata lama sekolah di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 1 atau 2 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).



Dimensi pengetahuan ditunjukkan dengan indikator harapan lama sekolah (HLS) dan Rata - rata Lama Sekolah (RLS), HLS Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sebesar 12,67 meningkat sebesar 0,49 poin atau sebesar 1,04% dari tahun sebelumnya. RLS Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sebesar 8,31 meningkat sebesar 1,12 poin atau sebesar 1,15% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah atau meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, kemudian bantuan pendidikan sekolah tinggi bagi putra putri daerah ikut mendorong peningkatan kesadaran bersekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan rata - rata lama sekolah agar lama sekolah agar IPM terus meningkat melalui Program :

- 1) Pemberan Beasiswa utusan Daerah yang diberikan bagisiswa/siswi yang berprestasi disekolahnya dan ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- 2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada siswa siswi yang sedang kuliah.
- 3) Bantuan untuk sarana dan prasarana.



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya :

1. Faktor budaya setempat.
2. Faktor sosial/tingkat kemiskinan.
3. Faktor geografi.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target dapat tercapai antara lain :

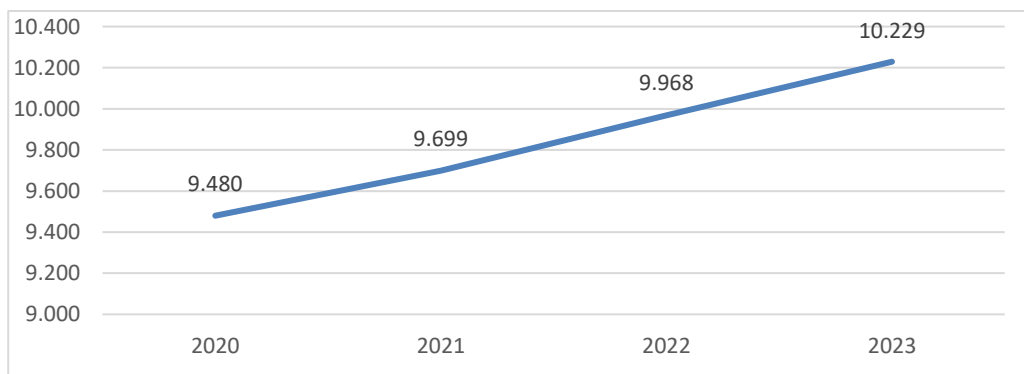
1. Meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan.
2. Melakukan usaha pemberantasan kemiskinan.
3. Menyelenggarakan sekolah terbuka dengan waktu yang fleksibel.

c. Standar Hidup layak Ekonomi

Dimensi kehidupan yang layak ditunjukkan dengan Pengeluaran per Kapita (Ribu rupiah/Orang/Tahun), pengeluaran per kapita Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sebesar Rp.10.229 ribu meningkat sebesar Rp.726 ribu atau sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya. Sebelumnya mengalami peningkatan, lebih baik dari sebelumnya mengalami penurunan (tahun 2022), program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digulirkan untuk masyarakat yang terdampak cukup memberi dampak positif bagi kemampuan daya beli masyarakat.



Grafik 4. Pengeluaran Perkapita Kab. Tanjung Jabung Barat





Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian. Bantuan sarana usaha banyak digelontorkan Pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha. Dalam dua tahun terakhir beberapa jenis bantuan diserahkan, diantaranya untuk petani berupa alat prontok padi (power thresher) sejumlah 108 unit, bantuan benih padi sawah untuk seluas 3.000 Ha, bantuan benih padi rawa untuk seluas 500 ha, bantuan paket padi lahan kering seluas 327,5 Ha, bantuan pengembangan jeruk untuk seluas 10 Ha, bantuan paket kacang tanah untuk seluas 100 Ha, bantuan pengembangan kawasan jahe seluas 10,25 Ha, dan bantuan sarana pasca panen seperti UPH, CHK, UV dryer dan lainnya yang semuanya berjumlah 9 unit kemudian bantuan untuk kelompok tani berupa bantuan ternak sapi sejumlah 216 ekor untuk 23 kelompok tani, kambing sejumlah 75 ekor untuk 3 kelompok tani, ayam sejumlah 1.800 untuk 3 kelompok tani, itik sejumlah 400 ekor untuk 1 kelompok tani, disamping itu diberikan juga bantuan bibit tanaman kebun seperti bibit kelapa dalam sebanyak 16.900 batang kepada 6 kelompok tani, bibit pinang sebanyak 400.000 batang untuk 19 kelompok tani, selain bantuan ternak dan bibit tanaman diberikan juga bantuan pupuk, hebrisida, dan peralatan perkebunan.

Selama dua tahun terakhir (2022 dan 2023), bantuan bagi nelayan berupa kapal tangkap sejumlah 145 kapal, mesin kapal 125 unit, jaring 630 unit, dan GPS Handheld sejumlah 17 unit, untuk pembudidaya ikan diberikan bantuan paket budidaya ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan gurame, ikan bandeng, dan udang semuanya berjumlah 14 paket, disamping bantuan paket ikan juga diberikan bantuan sarana budidaya berupa mesin pakan, kolam terpal yang semuanya berjumlah 17 paket.

Terdapat penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan berupa lantai jamur, rumah RMU, dan mesin RMU semuanya berjumlah 6 paket yang tersebar di kecamatan – kecamatan penghasil padi yaitu Kec. Batang Asam,



Kec. Tungkal Ulu, Kec. Pengabuan, dan Kec. Senyerang. Mendukung pemulihan ekonomi nasional, terhadap UMKM Pemerintah daerah memberikan bantuan pelatihan, sarana/prasarana, dan modal kepada masyarakat baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi Jambi, dan APBN, bantuan yang diberikan berupa pelatihan membatik disertai bantuan peralatan membatik kepada 5 kelompok berjumlah 150 orang untuk 5 kecamatan, pelatihan membuat dendeng juga 5 kelompok dengan jumlah 150 orang, pelatihan kewirausahaan di 4 kecamatan, pelatihan mengurus perizinan di 8 kecamatan, pelatihan manajemen UMKM di 8 kecamatan, bantuan gerobak dagang sejumlah 27 buah, bantuan sarana produksi untuk 34 kelompok, bantuan modal usaha untuk 116 orang, dan bantuan produktif usaha mikro berupa modal usaha kepada 1.335 UMKM.

Selain bantuan pemerintah daerah dalam bentuk barang, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan cara pelatihan kerja, Pemerintah daerah melalui dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan di Balai Latihan Kerja, dalam dua tahun terakhir (tahun 2022 dan 2023), telah diselenggarakan pelatihan ketenagakerjaan yang sebanyak 20 paket diikuti 189 orang, berupa pelatihan membatik, menjahit, pelatihan montir motor, pembuatan kue dan roti, pelatihan instalasi listrik, pelatihan komputer dasar, dan pelatihan las.

dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap usaha pengerajin batik dan petani beras lokal dengan dikeluarkannya surat edaran bupati tanjung jabung barat tentang penggunaan batik motif/corak kabupaten tanjung jabung barat dan kebijakan pembelian beras produksi petani lokal oleh aparat sipil negara lingkup pemerintah kabupaten tanjung jabung barat.

HAMBATAN DAN SOLUSI

A. Hambatan

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks IPM adalah sebagai berikut :

Meskipun dalam 5 tahun terakhir IPM menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, tahun 2023 angka IPM sebesar 71,44 namun masih tetap terendah kedua dari 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.



Terdapat 3 komponen yang mempengaruhi IPM yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat (ekonomi).

Komponen pendidikan yang terdiri dari variabel Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), akses terhadap pendidikan merupakan faktor penyebab utama rendahnya rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, konsentrasi akses pendidikan yang baik lebih banyak terdapat di Kota Kuala Tungkal dan beberapa perkotaan kecamatan. Sekitar +40% penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat tersebar tidak merata dan dengan akses yang tidak baik. Disatu sisi terdapat sekolah dengan jumlah murid/rombongan belajar yang melebihi kapasitas disebabkan jumlah sekolah yang tidak memadai, disisi lain terdapat sekolah negeri dengan jumlah murid yang sangat sedikit dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit dan juga motivasi/dorongan untuk bersekolah yang rendah pula.

Untuk komponen kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap berperilaku hidup sehat yang masih rendah, berdasarkan pengamatan Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat, sedikit sekali masyarakat yang memanfaatkan layanan screening Kesehatan, screening kesehatan dilakukan guna untuk memeriksa penyakit dan kondisi kesehatan sebelum muncul tanda atau gejala apapun melalui tes kesehatan.

Komponen pendapatan masyarakat (ekonomi), faktor rendahnya pendapatan masyarakat menjadi faktor utama untuk komponen ekonomi, tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,79 persen atau terdapat 33.607 penduduk dibawah garis kemiskinan. Sekolah gratis yang menjadi program pemerintah masih belum cukup untuk membantu masyarakat miskin bersekolah disebabkan kebutuhan bersekolah tidak hanya biaya sekolah itu sendiri namun aksesori pelengkap seperti seragam, buku, dan lainnya masih menjadi beban bagi masyarakat.

B. SOLUSI

Adapun solusi terhadap hambatan diatas adalah sebagai berikut :



Terhadap komponen pendidikan, penyediaan akses yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan/sekolah terutama di daerah – daerah kecamatan. Akses tersebut dapat berupa :

- a. Penyediaan unit sekolah baru (USB) bagi suatu daerah dengan jumlah penduduk yang banyak dan sekolah sedikit;
- b. Penyediaan akses jalan dari/permukiman penduduk ke sekolah, untuk memudahkan murid untuk hadir disekolah setiap harinya; Membantu dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penduduk tertentu yang mengalami kesulitan untuk bersekolah.
- c. Mengoptimalkan kurikulum merdeka, untuk menarik dan menjaga minat sekolah.

Untuk komponen kesehatan, agar kesadaran masyarakat meningkat terhadap pentingnya berperilaku hidup sehat :

- a. Pemerintah daerah terus giat memberikan sosialisasi mengenai bagaimana perilaku hidup sehat yang baik, dengan mengoptimalkan kader – kader kesehatan yang ada sampai di tingkat desa;
- b. Meningkatkan sarana layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu, dengan menambah tenaga kesehatan dan sarana/prasarana kesehatan guna dapat memberikan layanan yang maksimal.

Untuk komponen pendapatan masyarakat (ekonomi), dengan mempedomani instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan strategi kebijakan yang meliputi :

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,
- b. Peningkatan Pendapatan masyarakat,
- c. Penurunan jumlah masyarakat miskin di daerah kantong – kantong kemiskinan.

Melalui pelaksanaan program – program OPD seperti program perlindungan dan jaminan sosial, pengelolaan perikanan tangkap,



penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, kawasan permukiman, dan lainnya yang kegiatannya berupa pemberian bantuan sarana prasarana untuk kelompok masyarakat miskin, pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pemberian bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai, bantuan rehabilitasi rumah untuk masyarakat kurang mampu, hingga pendataan masyarakat miskin, yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya, dan terus dilaksanakan hingga mencapai target angka kemiskinan

Table 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Pembangunan Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
PENDIDIKAN					
1	Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)	Rp. 124,606,166,432,-	Rp. 122,416,042,802,-	Rp. 2,190,123,630,-	1.75
KESEHATAN					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 79,746,587,554	Rp. 77,717,322,963	Rp. 2,029,264,591	1.03
DISKOPERINDAG					
1	Program Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro	Rp. 81,698,650	Rp. 65,219,500	Rp. 16,479,150	20.17
DINAS TENAGA KERJA					
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja	Rp. 367,602,000	Rp. 352,316,008	Rp. 15,285,992	4,15



JUMLAH	Rp. 204,802,054,636	Rp. 200,550,901,273	Rp. 4,251,153,363	2.07
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	------

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 4 program yaitu **program Program Pengelolaan Pendidikan** (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, **Program Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro** dan **Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja** yaitu sebesar 104,28% dengan efisiensi anggaran 2.07%. Ini membuktikan adanya sedikit efisiensi dalam pelaksanaan program-program untuk mencapai sasaran kinerja Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel.



SS 2 **Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat**



pada sasaran ini mempunyai 1 (*satu*) Indikator Utama yaitu Indeks Ketentraman dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Table 14. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Ketentraman	-		53,00	59.00	62.00	86.64	103.13	73,50
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : Penilaian Mandiri Satuan Polisi Pamong Praja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sehingga Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 telah tercapai 86,64 %.

Pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai 86,64 %, berarti keberhasilan telah melebihi target yang direncanakan sebesar 84,01 %. jika melihat pada tahun 2022 dengan realisaisi kinerja 59.00 dan 2021 dengan



capaian realisasi 53.00 terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari realisasi capaian indeks ketentraman. Hal ini dikarenakan penilaian indeks ketentraman Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dan 2022 dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan menggunakan Formulasi Penilaian yang berbeda dengan Satpol PP sehingga memiliki hasil capaian kinerja yang berbeda.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
3. Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada; dan
4. Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjab Barat.

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan pada Tahun 2023:

1. Perda Kab. Tanjab Barat Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Larangan dan Perbuatan Asusila;
2. Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 5 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (PKL,ODGJ,Anaka Lem);
3. Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; dan
4. Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang.



HAMABATAN DAN SOLUSI

A. Hambatan/Permasalahan

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dan semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
8. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
9. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi, Kenakalan remaja dan pelajar serta penggunaan narkoba dan Zat adiktif; dan
10. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal

SOLUSI

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta perlu upaya perluasan peningkatan kuantitas maupun kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan



Perda dan Perbup.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban;
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya pedagang dan anak-anak pemakai Zat Adiktif (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat;
4. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila (ODGJ) dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat;
5. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas;
6. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan

Table 15. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Ketentraman

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp 4,332,067,000	Rp. 4,241,740,141	Rp. 149,818,476	3.45
2	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 4,790,181,500	Rp. 4,463,554,300	Rp. 326,627,200	6.81
JUMLAH		Rp. 9,122,248,500	Rp. 8,705,294,441	Rp. 476,445,676	5.22



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat** dengan didukung oleh 2 program yaitu Program **pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran** dan **Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum** dan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja yaitu sebesar 103% dengan efisiensi anggaran 5.22 %.



SS 3

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 16. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	47,88	44.65	47,88	51,59	54,80	53,00	49.73	93.83	59,00
Rata-rata Capaian Kinerja										

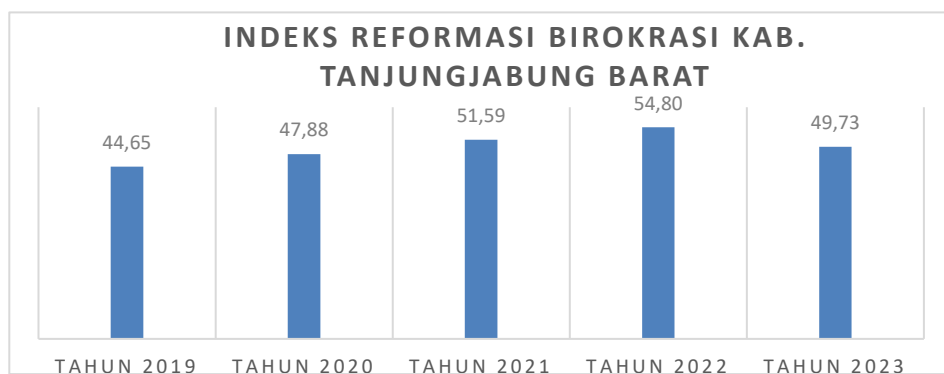
Sumber : LHE KemenPAN&RB, Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi Setda. Kab. Tanjab barat

Indeks Reformasi Birokrasi



Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan reformasi birokrasi yang mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024. Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (Lima) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 3 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pemerintah Kab. Tanjung jabung barat memperoleh indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 49.73. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 tidak dapat di perbandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena pada tahun 2023 Kementerian PANRB memiliki pedoman penilaian Indeks Reformasi Birokrasi baru pasca terbitnya PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan Penyesuaian Road Map Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 dengan mempedomani PermenpanRB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

Grafik 5. Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tanjungjabung Barat



Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi



Birokrasi yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 mendapatkan kategori **C** dengan nilai 49,73. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 17. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	2023
A	RB General	100	44,92
B	RB Tematik	20	4,81
C	Indeks RB	120	49,73
			C

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat, LHE KemenPANRB

Dari 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama RB General pada Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipilih 13 (sebelas) Kegiatan Utama yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Ketigabelas Kegiatan Utama tersebut adalah:

1. Penyederhanaan Birokrasi
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi.
5. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja
6. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
9. Pelaksanaan Arsip Digital
10. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
12. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN



13. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020-2024, dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun tersebut. Dari 5 (Lima) tema target tahunan RB Tematik dipilih 2 (dua) tema yaitu kemiskinan dan digitalisasi pemerintahan.

Rekomendasi dan Solusi

1) Rekomendasi

- a) Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level OPD. Melalui program – program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada Level OPD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
- b) Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berikut dengan ukuran keberhasilannya, untuk dijadikan acuan oleh pusat dan OPD dalam membangun Reformasi Birokrasi;
- c) Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pemerintah Pusat/Pemda dan OPD, untuk selanjutnya disinkronkan atau dicabut;

2) Solusi

- a) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Telah memperbaharui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 berdasarkan KemenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023;
- b) Rencana aksi sudah disusun dan dituangkan didalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c) Telah Melaksanakan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bupati dan



dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KemenPANRB ada beberapa Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tindaklanjut dari LHE tersebut dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Table 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 239,468,200	Rp. 220,779,250	Rp. 18,688,950	7.80 %
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 863,216,600	Rp. 447,429,868	Rp. 415,786,732	48.16%
	JUMLAH	Rp. 1,102,684,800	Rp. 434,475,682	Rp. 668,209,118	60.59%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif , efisien dan akuntabel dengan didukung oleh 2 program yaitu program peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yaitu sebesar 93,83% dengan efisiensi anggaran 60.59%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana.



SS 4 **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah**

Table 19. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	56,57	56,57	57,48	60,97	64,01	62,02	96,89	72,00
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : LHE Kemenpanrb, Bagian Organisasi. Bappeda, Inspektorat

Table 20. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	2023
A	Perencanaan Kinerja	30	21,23
B	Pengukuran Kinerja	30	16,28
C	Pelaporan Kinerja	15	11,43
D	Evaluasi Akuntabilitis Kinerja Internal	25	13,08
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPAN&RB 2023

Table 21. Kategori Penilaian SAKIP

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup Baik
C	>30-50	Agak Kurang
D	0-30	Kurang



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan menuju Pemerintahan yang lebih baik lagi, Hal ini dapat dilihat dari Nilai Hasil Evaluasi Sakip oleh Kemenpan RB pada tahun 2023 ini telah meningkat dari tahun-tahun dengan nilai 62,02 meningkat sebesar



6,07% dari tahun sebelumnya dengan nilai 60,97. Nilai SAKIP kab. Tanjung Jabung Barat dianggap cukup berhasil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten/Kota se-

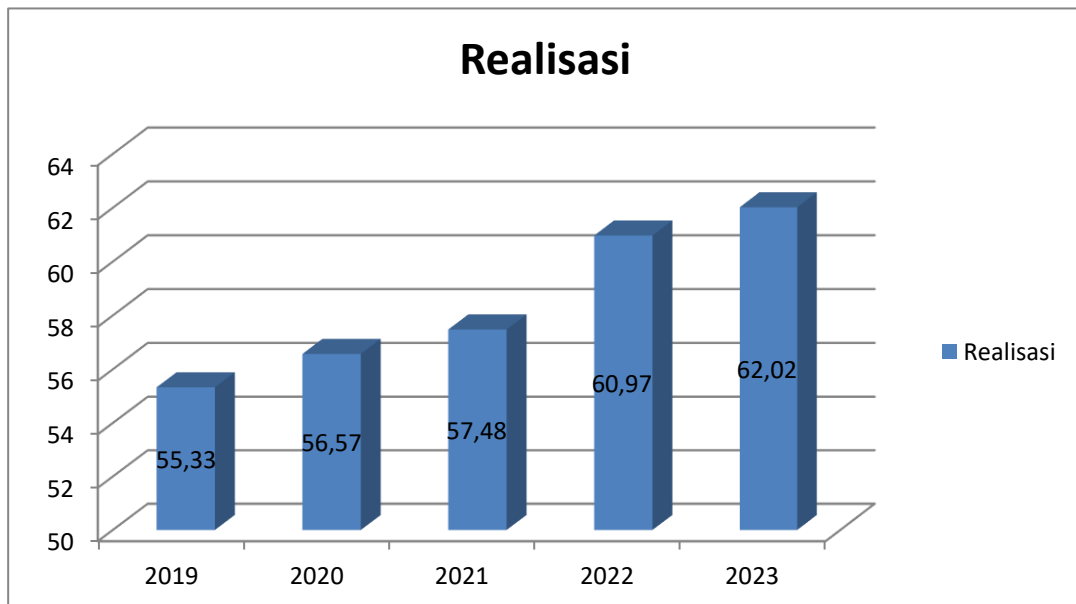
Indonesia yaitu 63,36. Hal ini tidak lepas dari dukungan dan komitmen penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan guna untuk meningkatkan Implementasi SAKIP salah satunya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Pembinaan dan Pendampingan SAKIP Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bupati dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dengan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda KemenPAN RB Ibu Ummu Nurhanifah dan analis kebijakan ahli pertama ibu Nararia Hastuti Ningtysah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk Pengembangan SAKIP berbasis elektronik yaitu Aplikasi E-SAKIP dan juga dalam rangka peningkatan SDM dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah





dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKIP kepada seluruh kepala perangkat daerah dengan narasumber dari Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi **Aplikasi “e-SAKIP”** ini adalah : Mendukung Terciptanya *Good Governance* dan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik memudahkan dalam hal mengukur kinerja instansi Pemerintah.

Grafik 6. Nilai Sakip Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 S/D 2023



Rekomendasi dan Solusi

Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh KemenpanRB melalui Laporan Hasil Evaluasi tahun 2023 dan solusi atau/tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1) Rekomendasi

- a) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
- b) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang



- SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- c) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
 - d) Menyusun pedoman teknis sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan memastikan pedoman teknis tersebut mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - e) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
 - f) Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
 - g) Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menilai capaian organisasi dan individu agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment;
 - h) Meningkatkan kualitas laporan kinerja Pemda maupun PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - i) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar



pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;

- j) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- k) Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

2) Solusi

- a) Revisi Renstra OPD
- b) Revisi Indikator kinerja simultan dengan revisi renstra
- c) Desk Reviu dan perbaikan perjanjian kinerja dari level Jabatan Tinggi s/d level operasional
- d) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis tentang Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntansi Kinerja Internal
- e) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
- f) Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
- g) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala, yang dimanfaatkan sebagai salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada setiap bulannya.
- h) telah dilakukan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja



- organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
- i) Laporan Kinerja OPD per triwulan/tahunan sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja
 - j) memberikan asistensi dan peningkatan Kompetensi kepada evaluator Inspektorat dan Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - k) dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Tim Evaluator SAKIP KemenPANRB
 - l) Penilaian SAKIP dijadikan sebagai salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima berdasarkan kategori prestasi kerja, berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat daerah tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di perangkat daerah.

Table 22. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Sakip Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Rp. 239,468,200	Rp. 220,779,250	Rp. 18,688,950	7.80 %
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 863,216,600	Rp. 447,429,868	Rp. 415,786,732	48.16%
3	PROGRAM PENYELENGARAAN	Rp. 807,696,600	Rp. 219,739,000	Rp. 587,957,600	72,79%



	PENGAWASAN				
	JUMLAH	Rp. 1,910,381,400	Rp. 887,948,118	Rp. 1,022,433,282	53.51%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah** dengan didukung oleh program Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu sebesar 96,89% dengan efisiensi anggaran **53.51 %**



SS 5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pada sasaran ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai 1 (Satu) indikator utama Indikator dengan capaian kinerja sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini :



Table 23. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	80,66		81,45	81.39	80.70	79.98	99.10	80,76
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : Bagian Organisasi Setda kab. Tanjung Jabung Barat, Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Universitas Islam Negeri Jambi Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023, Pemkab Tanjab Barat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Jambi dalam untuk Melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Survei dilakukan secara periodik dengan mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala *Likert* ini dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk



menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Salah satu media yang digunakan ialah layanan google form.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan survei terhadap seluruh Perangkat daerah dan Kecamatan di kabupaten tanjung jabung barat pada tahun 2023.

A. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Setelah diketahui hasil evaluasi SKM dan IKM masing-masing unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 44 perangkat daerah, selanjutnya dilakukan analisis respon masyarakat secara keseluruhan untuk melihat indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mendapat layanan di setiap unit pelayanan.

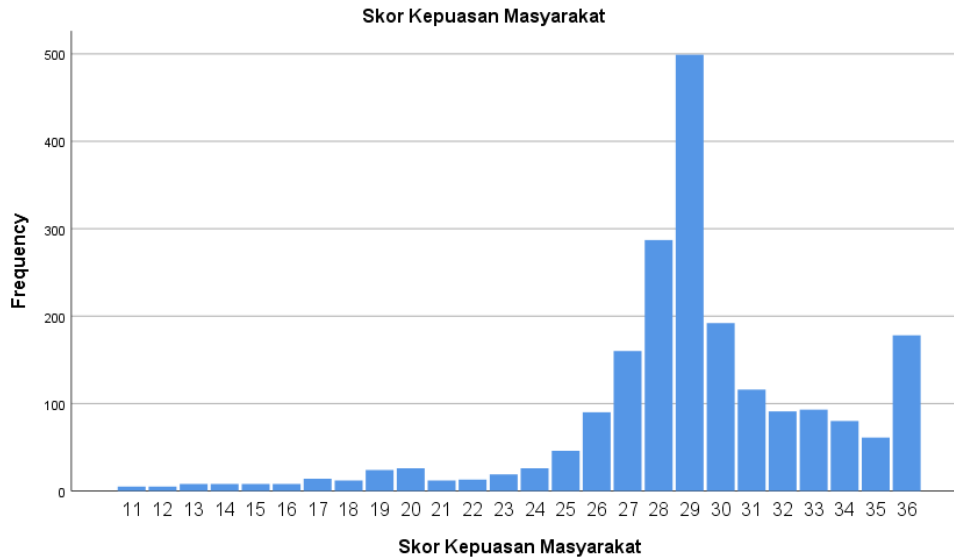
Table 24, Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

N	Valid	2081
	Missing	0
Mean		29.08
Median		29.00
Mode		29
Std. Deviation		4.324
Variance		18.695
Range		25
Minimum		11
Maximum		36

Formulir survei terdiri atas sembilan pernyataan dengan skor tertinggi masing-masing item adalah 4, dengan kata lain, skor tertinggi nilai kepuasan masyarakat sebesar 36. Sementara itu, rerata skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten tanjung Jabung Barat sebesar 29,08.



Grafik 7. Histogram kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat



1. Nilai SKM Kabupaten

Pengisian formulir survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di seluruh unit pelayanan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghasilkan bahwa lebih separuh unsur pelayanan, yakni persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana serta perilaku pelaksana mendapatkan respons yang baik dari Masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat dua unsur pelayanan yang dinilai kurang baik, yaitu waktu penyelesaian dan sarana dan prasarana, sementara dua lainnya berupa biaya/tarif serta pengaduan, saran dan masukan mendapatkan penilaian sangat baik.

Table 25. Evaluasi Unsur SKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,16	78,90	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,13	78,26	Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,06	76,45	Kurang Baik
U4	Biaya/tarif	3,68	91,98	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,12	78,09	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,15	78,78	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,19	79,85	Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,02	75,48	Kurang Baik



U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,57	89,32	Sangat Baik
----	------------------------------	------	-------	-------------

Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat direkomendasikan bahwa terdapat dua unsur pelayanan yang mendesak untuk ditingkatkan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unsur-unsur waktu penyelesaian serta sarana dan prasarana layanan harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik atau setidaknya baik. Sementara unsur-unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana serta perilaku pelaksana perlu ditingkatkan menjadi lebih baik atau setidaknya dipertahankan, sebagaimana unsur biaya/tarif serta pengaduan, saran dan masukan, yang juga harus dipertahankan agar tetap sangat baik.

2. Nilai IKM Kabupaten

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik di seluruh unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang merupakan akumulasi nilai rata-rata (NRR) tertimbang, adalah 3,20. Setelah dilakukan konversi, nilai tersebut sama dengan 79,98. Berdasarkan angka tersebut, kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam kategori baik. Dengan nilai dan kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat di seluruh unit pelayanan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap baik oleh mereka.

Table 26. IKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,16	0,35
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,13	0,34
U3	Waktu penyelesaian	3,06	0,34
U4	Biaya/tarif	3,68	0,40
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,12	0,34
U6	Kompetensi pelaksana	3,15	0,35
U7	Perilaku pelaksana	3,19	0,35
U8	Sarana dan prasarana	3,02	0,33
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,57	0,39
Nilai Indeks (NI)			3,20
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			79,98
Kinerja unit pelayanan			Baik



B. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh 44 perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh perbandingan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing perangkat daerah tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Table 27. Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Unit Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dan 2023

No	Unit Pelayanan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	80,44	Baik	78,55	Baik
2	Sekretariat DPRD	78,27	Baik	83,15	Baik
3	Inspektorat	80,73	Baik	78,13	Baik
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,76	Baik	84,14	Baik
5	Dinas Kesehatan	84,33	Baik	85,01	Baik
6	Dinas Ketahanan Pangan	80,39	Baik	83,11	Baik
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,9	Baik	76,80	Baik
8	Dinas Lingkungan Hidup	80,5	Baik	76,73	Baik
9	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	76,31	Kurang Baik	73,83	Kurang Baik
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,02	Sangat Baik	53,80	Tidak Baik
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86,63	Baik	82,24	Baik
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78,41	Baik	80,55	Baik
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77,14	Baik	78,55	Baik
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87,67	Baik	90,63	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,53	Baik	78,80	Baik
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	85,04	Baik	78,77	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78,26	Baik	93,20	Sangat Baik
18	Dinas Sosial	78,09	Baik	86,39	Baik
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	73,7	Kurang Baik	80,50	Baik
20	Dinas Tenaga Kerja	84,3	Baik	85,62	Baik
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	83,6	Baik	79,65	Baik
22	Dinas Perhubungan	74,8	Kurang Baik	81,95	Baik
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	73,7	Kurang Baik	81,50	Baik
24	Dinas Perikanan	74,75	Kurang Baik	85,94	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	83,73	Baik	80,78	Baik
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	92,62	Sangat Baik	85,74	Baik



SDM Daerah					
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	81,78	Baik	81,10	Baik
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,75	Sangat Baik	78,75	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,7	Kurang Baik	79,41	Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana	82,93	Baik	87,11	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	91,3	Sangat Baik	85,43	Baik
32	Kecamatan Batang Asam	81,54	Baik	82,64	Baik
33	Kecamatan Bramitam	79,53	Baik	77,63	Baik
34	Kecamatan Merlung	77,61	Baik	79,47	Baik
35	Kecamatan Tebing Tinggi	84,66	Baik	84,27	Baik
36	Kecamatan Tungkal Ilir	82,92	Baik	84,50	Baik
37	Kecamatan Muara Papalik	73,79	Kurang Baik	78,59	Baik
38	Kecamatan Pengabuan	88,25	Baik	78,31	Baik
39	Kecamatan Kuala Betara	82,89	Baik	82,96	Baik
40	Kecamatan Tungkal Ulu	85,02	Baik	79,35	Baik
41	Kecamatan Betara	76,31	Kurang Baik	83,63	Baik
42	Kecamatan Renah Mendaluh	78,84	Baik	77,92	Baik
43	Kecamatan Seberang Kota	76,18	Kurang Baik	77,00	Baik
44	Kecamatan Senyerang	74,8	Kurang Baik	86,08	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan nilai IKM di atas, beberapa perangkat daerah telah meningkatkan mutu pelayanannya. Sembilan unit pelayanan telah memperbaiki kinerja pelayanannya dari kurang baik pada tahun 2022 meningkat menjadi baik pada tahun 2023, dan dua unit lainnya dari baik meningkat menjadi sangat baik. Sementara itu, terdapat satu perangkat daerah yang tetap berada di kategori kinerja pelayanan kurang baik.

Selain itu, terdapat pula penurunan kualitas pelayanan perangkat daerah di tahun 2023, tiga unit pelayan yang memperoleh kinerja pelayanan sangat baik baik pada tahun sebelumnya menurun menjadi baik. bahkan satu perangkat daerah yang memperoleh kinerja pelayanan sangat baik menurun drastis menjadi tidak baik.

Hasil analisis IKM tahun 2023 merekomendasi bahwa terdapat dua unit pelayanan yang mendesak untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit-unit pelayanan yang mendapat nilai IKM kurang baik bahkan tidak baik harus ditingkatkan kualitas pelayanannya agar nilai IKM-nya menjadi sangat baik atau setidaknya baik. Sementara 40-unit pelayanan perlu meningkatkan kualitas pelayanannya agar meningkat menjadi sangat baik atau setidaknya dipertahankan, sebagaimana dua unit pelayanan lainnya, yang juga harus mempertahankan nilai IKM-nya agar tetap menjadi sangat baik.



C. REKOMENDASI

Merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Barat, beberapa kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya:

1. Penilaian terendah masyarakat berdasarkan hasil SKM terkait unsur waktu penyelesaian serta sarana dan prasarana pelayanan, maka perlu kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjung Barat untuk: (a) menetapkan standar waktu penyelesaian layanan di masing-masing perangkat daerah, dan (b) menetapkan standar dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan di masing-masing perangkat daerah;
2. Perangkat daerah yang memperoleh nilai IKM dengan kinerja pelayanan “Kurang Baik” dan “Tidak Baik” perlu mendapat penguatan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.
3. Masing-masing unsur masih dinilai kurang baik di beberapa perangkat daerah, maka dalam rangka perbaikan semua unsur perlu dilakukan;
 - a. Publikasi yang massif terkait setiap unsur SPM pelayanan yang diberikan melalui penyebaran informasi di ruang publik (melalui media masa, media social maupun papan pengumuman di ruang publik) di masing-masing perangkat daerah;
 - b. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana pelayanan masing-masing perangkat daerah;
 - c. Penguatan komitmen dari unit pelayanan dan aparatur unit pelayanan masing-masing perangkat daerah untuk melaksanakan SOP yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perjanjian kinerja/fakta integritas; dan
 - d. Penguatan pengawasan terhadap unit pelaksana pelayanan dari pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, atasan langsung, sesama rekan kerja dan kontrol social dari masyarakat luas. Hasil pengawasan ini dapat ditindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment terhadap kinerja



pegawai dan institusinya.

4. Menetapkan rencana pengembangan SDM penyelenggara pelayanan melalui pendidikan, diklat, magang dan lainnya secara terencana khususnya bagi unit yang melayani masyarakat secara langsung. Penguatan kapasitas dan kompetensi ini difokuskan melalui pemberian pelatihan service excellent (pelayanan prima) untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.

Table 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	Rp. 144.984.300	Rp. 136,512,400	Rp. 8.471.900	5.84 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan didukung oleh program Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana yaitu sebesar 99.10% dengan efisiensi anggaran 5.84 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui kerjasama yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Islam Negeri Jambi dalam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SS 6

Meningkatnya kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah

Pada sasaran ke 6 (*Enam*) Meningkatkan kinerja, penganggaran, pengelolaan, keuangan dan aset daerah memiliki 1 (*satu*) indikator utama yaitu Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, seperti penjelasan pada tab dibawah ini :



Table 29. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda Kab. Tanjung Jabung Barat oleh BPK

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk keempat kalinya secara berturut-turut (2020, 2021, 2022, 2023) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan(BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi



komponen penting karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Opini WTP sangat penting karena dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara sekaligus bukti bahwa keuangan telah dikelola secara profesional, pruden, transparan dan akuntabel.

Table 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 215.740.156.762	Rp. 210.254.161.562	Rp. 5.485.995.200	2,54
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1,713,350.000	Rp. 1.250.871.248	Rp. 462,478,752	26,99
JUMLAH		Rp. 217.453.506.762	Rp. 211.505.032.810	Rp. 5,948,473,952	2,73

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja, penganggaran,**



pengelolaan, keuangan dan aset daerah dengan didukung oleh 2 program yaitu program **Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** yaitu sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 2,73 %. Dengan capaian kinerja yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



SS 7 Meningkatkan perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan



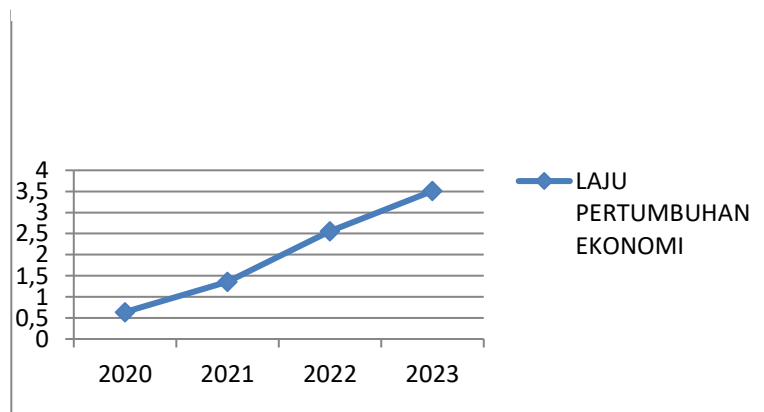
Dari sasaran Strategis Meningkatkan perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan tersaji dalam tabel berikut ini :

Table 31. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	0,64%	0,64%	1,36%	2,56%	2,50%	3,51%	140,4%	4,00%
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : PDRB Tanjung Jabung Barat 2020-2023, BPS Kab. Tanjung Barat

Grafik 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi





Pertumbuhan ekonomi Kab. Tanjung Jabung Barat dengan melihat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling kerap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023 digunakan dan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,59 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,25 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,98 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,15 persen. Sampai dengan



triwulan III-2023, Ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 15,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 8,69 persen. Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III-2023 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 32,60 persen terhadap PDRB. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 65,44 persen.

laju pertumbuhan PDRB Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sebesar 3,51%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,56%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan semakin membaiknya kinerja perekonomian kab. Tanjung Jabung Barat walaupun dalam masa pasca pandemi Covid-19, Dalam struktur perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, peranan bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang terbesar dalam menyumbang PDRB yaitu sebesar 31,13, kemudian diikuti bidang pertambangan dan penggalian, dan bidang industri pengolahan. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah meningkatnya produksi pada lapangan usaha tersebut, serta adanya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab kembali meningkatnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

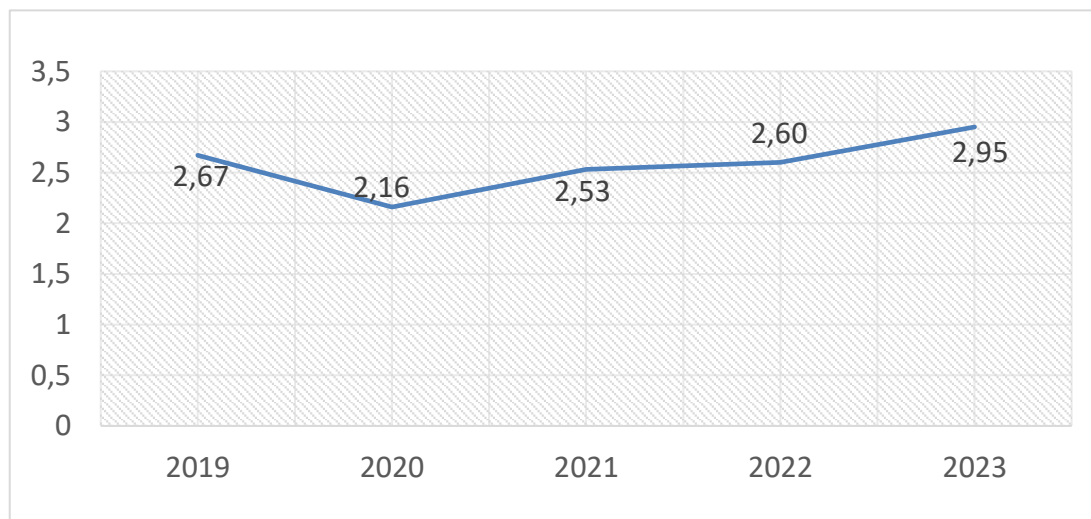
Ditunjukkan dengan meningkatnya ekspor barang dan jasa seperti komoditi kelapa, pinang dan sawit serta hasil laut yang mengalami peningkatan sebesar 2.83 % dari tahun sebelumnya, kemudian sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 4.14 % dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2022 sebesar 10,00%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,75 point atau 6,98%. Menurunnya angka kemiskinan menggambarkan berkurangnya jumlah orang yang berpenghasilan rendah dibawah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.147 orang menjadi 33.950 orang. Program – program pendukung pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah



seperti peningkatan UMKM dan mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat mampu menurunkan jumlah penduduk miskin Tanjung Jabung Barat. Pemerintah daerah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan secara sinergitas, yang melibatkan beberapa bidang urusan seperti UMKM, Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan permukiman, Pekerjaan Umum serta melibatkan Pemerintahan Desa.

Grafik 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Kab. Tanjung Jabung Barat



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2023 sebesar 2,95, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,35 point atau 17,13%. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bertambahnya jumlah orang angkatan kerja yang tidak bekerja. Berdasarkan Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, pengangguran dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran di Kab. Tanjung Jabung didominasi dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 39,03% dan SMK sebesar 19,52%, ini sejalan dengan komposisi penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat didominasi oleh penduduk usia remaja dan dewasa. Imbas dari resesi global serta situasi dalam pemulihan pasca covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang juga dirasakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi penyebab utama dari bertambahnya pengangguran.



HAMBATAN DAN SOLUSI

A. HAMBATAN

Adapun hambatan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Sedangkan tingkat kesenjangan pendapatan dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas, dampaknya tidak meratanya perkembangan antar kecamatan, sehingga kesenjangan (gap) antar wilayah kecamatan semakin tampak.
- 2) Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pdrb kab. Tanjung jabung barat berkisar 28% sampai dengan 32%, dengan subkategori pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan sebagai pengungkit perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Masih rendahnya harga komoditi pinang dan kelapa dalam sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap daya beli masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat yang dampaknya menyebabkan perputaran ekonomi juga melambat. kedua komoditi tersebut merupakan terbesar kedua menurut kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi setelah Kab. Tanjung Jabung Timur. Besaran luas lahan perkebunan pinang dan kelapa dalam tersebut adalah potensi sumber daya alam yang menyokong perekonomian Kab. Tanjung Jabung Barat, sekitar 6.646 kk petani bekerja/mencari penghasilan dari usaha perkebunan pinang dan sekitar 16.770 kk dari usaha kelapa dalam.
- 3) Inflasi yang tidak stabil dan cenderung naik tiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, menyebabkan juga menurunnya daya beli masyarakat.
- 4) Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya keluar daerah atau ekspor, banyak usaha kecil dan menengah tidak



berkembang tumbuh, bahkan ada yang tutup. Banyaknya jumlah pelaku umkm cukup berdampak pada melambatnya perputaran ekonomi.

SOLUSI

Adapun solusi untuk hambatan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat seperti jalan, jembatan, pasar, dermaga, di beberapa kecamatan yang lambat perkembangannya, diantaranya Kec. Seberang Kota, Kec. Senyerang, Kec. Kuala Betara, dan Kecamatan Renah Mendaluh.
- 2) Menarik minat investor agar menanamkan modalnya/investasi di Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan mendirikan manufaktur pengolahan hasil perkebunan (hilirisasi) terutama manufaktur pengolahan pinang dan kelapa dalam. Dengan adanya manufaktur pengolahan pinang dan kelapa dalam akan memudahkan petani dalam memasarkan hasil perkebunannya, dimana rentang jarak dan waktu yang pendek akan mengurangi biaya produksi dan permainan harga pihak penampung, yang dapat menyebabkan Meningkatnya harga jual komoditi tersebut.
- 3) Pemerintah daerah harus optimal mencarikan pangsa pasar bagi produk umkm, beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media online. Selain itu memfasilitasi pengurusan izin dan sertifikat kelengkapan usaha lainnya agar produk UMKM memiliki daya saing.
- 4) Melakukan program bantuan langsung kepada pelaku UMKm dan Petani baik berupa sarana prasarana usaha, modal usaha, dan pelatihan bagi UMKM agar umkm dapat berkembang dan bertambah.



Table 32. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 5,297,343,750	Rp. 5,275,705,613	Rp. 21.638.137	0.41
2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp. 1,936,740,400	Rp. 1,868,074,640	Rp. 68,665,760	3.55
3	Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan mikro	Rp. 81,698,650	Rp. 65,219,500	Rp. 16,479,150	21,17
4	Program pengembalian iklim penanaman modal	Rp. 61,150,000	Rp. 53,075,000	Rp. 8,075,000	13.20
JUMLAH		Rp. 7,376,932,800	Rp. 7,262,074,753	Rp. 114,858,047	1.55

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat** dengan didukung oleh 4 program yaitu program **Penyediaan dan Pengembangan saran pertanian**, Program **penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian**, Program **Pemberdayaan Usaha menengah usaha kecil dan mikro** dan Program **Pengembalian iklim penanaman modal** yaitu sebesar 140,4% dengan efisiensi anggaran 1.55 %.



SS 8 **Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup**



Dari sasaran Strategis Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup tersaji dalam tabel berikut ini :

Table 33. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,22	68,22	68,25	69.61	68.70	72.69	105,80%	70,00
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : Aplikasi IKLH kementerian Lingkungan Hidup

IKLH Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Enviromental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah. IKLH nasional merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia sedangkan IKLH



Kabupaten akan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup dari di Kabupaten tersebut. Dalam perkembangan perhitungan, IKLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2023 merupakan penghitungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menurunkan tingkat pencemaran air, udara dan lahan.

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

IKLH yang untuk tahun 2023 ini sudah melebihi target. Realisasi tahun 2023 yakni 72,69. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

$$\text{IKLH 2023} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) = 72,69$$

Sumber Formulasi: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil perhitungan IKA 50.00 dengan indeks respon 13,08.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil 94.46 dengan indeks respon 10,00.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2023 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil 54.94 dengan indeks respon 12,50.

Untuk capaian IKLH tahun 2023 106%. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 ini adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air.

Selain itu diperlukan juga peningkatan pengawasan terhadap badan



usaha dalam pengelolaan air limbah serta penambahan dan peningkatan personil dalam pengendalian tutupan lahan.

2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Pada tahun 2023, telah terjadi penurunan jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut juga disertai dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara sederhana sehingga indikator kinerja terealisasi sesuai target dengan capaian 100%.
- Desa Dataran Kempas berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim Lestari (Proklam Lestari) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Proklam merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Proklam Lestari merupakan penghargaan tertinggi terhadap apresiasi pembinaan proklam. Desa Dataran Kempas merupakan satu-satunya di provinsi Jambi yang berhasil meraih penghargaan Proklam Lestari pada tahun 2023.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- Sebanyak 15.607 Ton sampah yang masuk ke TPA namun angka ini hanya estimasi karena untuk besaran yang lebih terukur diperlukan adanya jembatan timbang. sampah yang masuk ke TPA Lubuk Terentang dapat ditangani sepenuhnya namun sampah yang masuk ke landfill masih terkendala dalam pengaturan sampah yang masuk dikarenakan volume sampah yang seharusnya ditimbun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk menimbun. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :
 - a. Terbatasnya Prasarana Dan Sarana Yang Menunjang Kegiatan Dimaksud



- b. Kurangnya Petugas Penyapu Jalan, Drainase, Serta Pemotong Rumput Karena Cakupan Luasan Wilayah Kerja Semakin Bertambah Sesuai Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Penduduk
- c. Kurangnya Peralatan Yang Memadai
- d. Upah Masih Dibawah Umr

Namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dapat mengoptimalkan pengelolaan persampahan walaupun tidak 100% pendistribusian sampah di Kabupaten dapat terangkut penuh. Sebagai salah satu contoh Kabupaten Tanjung Jabung Barat membina 2 Desa terkait program dari Provinsi yang dinamakan “Kampung Mantap”. Program ini diperuntukan demi menjaga ekosistem yang ada di Sungai Batanghari ungkap Gubernur Jambi Al Haris. Melalui program provinsi ini Dinas Lingkungan Hidup beserta berbagai kalangan membina 2 desa yakni Desa Semau dan Desa Teluk Nilau yang mana salah satunya mendapat predikat sebagai kampung mantap juara II se provinsi Jambi yakni desa Teluk Niau.

4. Bidang Tata Lingkungan

- Selama tahun 2023 sebanyak 49 perusahaan yang disetujui rekomendasi perizinan SPPL.
- Permasalahan yang dihadapi ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan dokumen RKL-RPL, dan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa melakukan survei ke beberapa perusahaan yang belum menyampaikan dokumen tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran untuk survei lapangan sebab banyak perusahaan yang berada di luar daerah.

Berdasarkan Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal, wajib memiliki Dokumen RKL-RPL dan wajib melaporkan setiap per 6 (enam) bulan sehubungan dengan PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mewajibkan pemegang izin lingkungan wajib menyampaikan Laporan RKL-RPL dan Laporan UKL-UPL secara berkala setiap 6



bulan sekali (Pasal 53).

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.

- Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” sangat baik dikarenakan 100% dari apa yang menjadi target Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini selain sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan juga tidak terlepas dari pemantauan berkala kualitas lingkungan dan koordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal memfasilitasi pengambilan sampel, dan juga tersedianya laboratorium DLH Provinsi Jambi yang jaraknya masih dapat ditempuh dengan kendaraan.
- Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM Tanjung Jabung Barat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Terbukti pada tahun 2023 ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dua daerah mendapatkan penghargaan berupa “Kampung Mantap” pada Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan dan “Proklam Lestari” pada Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi.

Table 34. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 289.699.600	Rp. 269.586.380	Rp. 20,113,220	93.06%
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Rp. 174.587.500	Rp. 167.174.364	Rp. 7,413,136	95,75



	Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 37.760.000	Rp. 34.560.000	Rp. 3,200,000	91,53
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 8.555.383.160	Rp. 8.211.360.570	Rp. 344,022,590	95,98
	JUMLAH	Rp. 9,057,430,260	Rp. 8,682,681,314	Rp. 374,748,946	95,86



SS 9

Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota



Dari sasaran Strategis 9 (sembilan) yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota dalam tabel berikut ini :

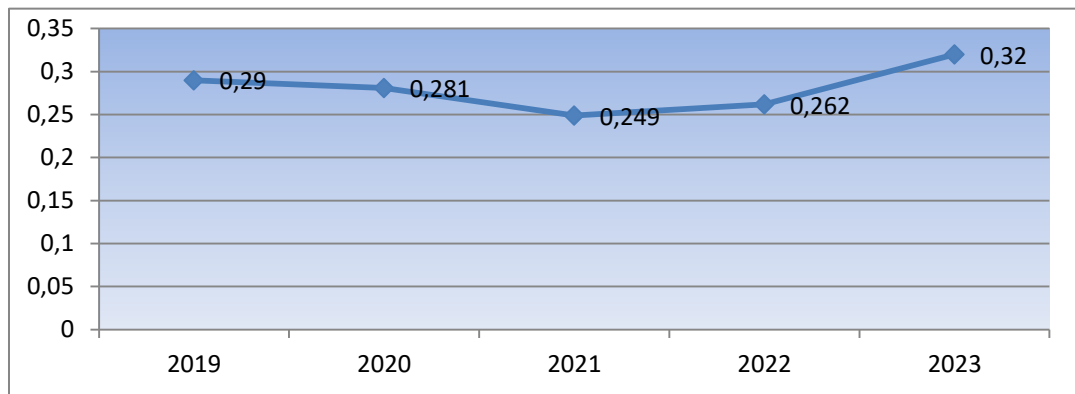
Table 35. Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD	Realisasi			2023			Target Akhir RPJMD 2026
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Gini*	0,281	0,281	0,249	0,262	0,28	0,32	114.28	0,250
2	Indeks Infrastruktur**	62,15	-	62,15	70,56	67,85	79,27	66.32	73,19
Rata-rata Capaian Kinerja									

Sumber : *Gini rasio Kab. Tanjung Jabung Barat 2023, BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, **hasil Perhitungan data kompilasi BAPPEDA Kab. Tanjab Barat

A. INDEKS GINI

Grafik 10. Indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2019-2023





Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/pelebaran daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan, faktor lain yang ikut menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah konsentrasi kekayaan yang tidak merata.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Di Provinsi Jambi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi yang diukur oleh



Gini Ratio adalah sebesar 0,343 Pada Maret 2023,. Angka ini naik 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,335 dan naik 0,015 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,320.

indeks Gini Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 indeks gini Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami kenaikan sebesar 0,058 poin dari 0,262 menjadi 0,32, kenaikan tersebut terbilang masih cukup kecil sekali dari tahun sebelumnya. Selain keterbatasan anggaran dalam membangun beberapa kecamatan yang tertinggal (Kec. Seberang Kota, Kec. Kuala Betara, Kec Renah Mendaluh, dan Kec. Senyerang), kecamatan – kecamatan tersebut secara infrastruktur cukup tertinggal dari 9 kecamatan lainnya, dari sisi geografi memiliki kondisi letak daerah yang tidak mudah di akses, selain itu Imbas dari resesi global serta situasi dalam pemulihan pasca covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang juga dirasakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi penyebab dari ketidakmerataan pendapatan ataupun pembangunan. Dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu.

B. INDEKS INFRASTRUKTUR

1) **Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**

Target IKU Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2023 adalah 45 % dan terealisasi 43,64% dengan capaian kinerja 96,98% atau sekitar 548,11 KM jalan dengan kondisi yang mantap dari 1256 KM total panjang jalan kabupaten. Capaian pada tahun 2023 terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan indikator pada tahun 2021 dengan Realisasi 37,3%. pencapaian indikator ini di karenakan peningkatan jumlah anggaran yang tersedia untuk penanganan kondisi jalan yang buruk baik dari kegiatan rekonstruksi jalan maupun dari kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan.

2) **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah**

Target kinerja Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan



air limbah pada tahun 2023 adalah 69% dan realisasi 65,02%, Atau sebanyak 64.234 Rumah tangga telah memiliki akses terhadap pelayanan air limbah yang aman dari 98.798 jumlah total rumah tangga di kabupaten tanjab barat pada tahun 2022. Adapun Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 94,23%. Capaian ini dikategorikan Baik, karena telah hampir mendekati target yang telah ditetapkan, target ini dapat di capai karena adanya bantuan pendanaan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2023. Indikator ini juga merupakan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di amanatkan oleh pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah melalui dinas PUPR. realisasi target ini bisa di katakan menurun bila di dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 119,38 %, secara teknis jumlah penerima bantuan pengelolaan air limbah meningkat namun yang menjadi pembanding menurunnya realisasi target ini adalah adanya perbedaan bilangan pembagi yaitu jumlah rumah tangga yang terkonfirmasi (data dukcapil 2023) 98.798 RT yang jauh meningkat dari jumlah RT pada 2022 sebanyak 83.654 RT.

3) **persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten**

Target kinerja persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten pada tahun 2023 adalah 75% dengan realisasi 73,65 % sehingga capaian nya adalah sebesar 98,20% Atau terdapat 72.770 rumah tangga yang telah terlayani akses air minum baik dari pelayanan yang berbasis perpipaan atau pun yang non perpipaan dari 98.798 jumlah total rumah tangga di kabupaten Capaian ini dikategorikan baik, dikarenakan hampir mendekati target yang di rencanakan, tidak ada permasalahan yang bersifat teknis untuk pencapaian target ini, pemenuhan indikator ini sudah sesuai dengan perencanaan di Renstra mau pun RPJMD kabupaten, walaupun terjadi penurunan di besaran capaiannya yang terjadi karena perbandingan bilangan pembagi yaitu jumlah rumah tangga kabupaten yang terkonfirmasi (data dukcapil 2023) 98.798 RT yang jauh meningkat dari jumlah RT pada 2023 sebanyak 83.654 RT. Indikator Kinerja Utama Ini juga merupakan target SPM yang di amanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kab. Tanjab Barat.

HAMBATAN DAN SOLUSI

A. Hambatan

Adapun hambatan dalam meningkatkan indeks gini dan indeks infrastruktur



adalah sebagai berikut:

Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkatan Moderat. Ketimpangan pendapatan lebih disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, wilayah, dan sosial yang belum merata, di beberapa wilayah (kecamatan/desa) masih tertinggal dari wilayah (kecamatan/desa) lain dari sisi ketersediaan infrastruktur dasar. Kesempatan/peluang daerah untuk berkembang yang kecil akan menurunkan kemampuan masyarakatnya dalam memperoleh pemasukan/pendapatan, faktor lain yang ikut menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah konsentrasi kekayaan yang tidak merata.

Faktor letak geografis menjadi persoalan utama dalam pembangunan, kondisi di sebagian wilayah timur terdapat banyak sungai – sungai baik besar maupun kecil yang memisahkan desa dan atau kecamatan menjadi penyebab sulitnya akses untuk membangun. Dibutuhkan upaya yang lebih baik dari sisi fisik infrastruktur maupun anggaran dalam membangun desa – desa / wilayah dengan akses yang sulit.

SOLUSI

Adapun solusi untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

Menyediakan akses utama seperti jalan poros dan jembatan penghubung untuk menghubungkan antara desa-kelurahan-kecamatan lain-kota Kuala Tungkal-daerah luar. Dengan tersedianya akses poros dapat menjadi pemicu utama geliat perekonomian bagi daerah yang dilalui atau di sekitar jalan poros. Jalan poros yang mantap memudahkan masyarakat untuk mobilitas orang dan barang, memasarkan hasil pertanian, distribusi barang dagangan, dan aktivitas lainnya.

Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Pengabuan sebagai kecamatan yang tertinggal dari kecamatan – kecamatan lainnya menjadi sasaran prioritas pembangunan. Dengan membangun infrastruktur jalan poros dan jembatan besar yang bisa dilewati kendaraan roda empat yang menghubungkan antar desa-desa-ibu kota



kecamatan diharapkan kecamatan – kecamatan tersebut di atas dapat berkembang dengan cepat dan dapat menyamai dengan kecamatan yang sudah maju.

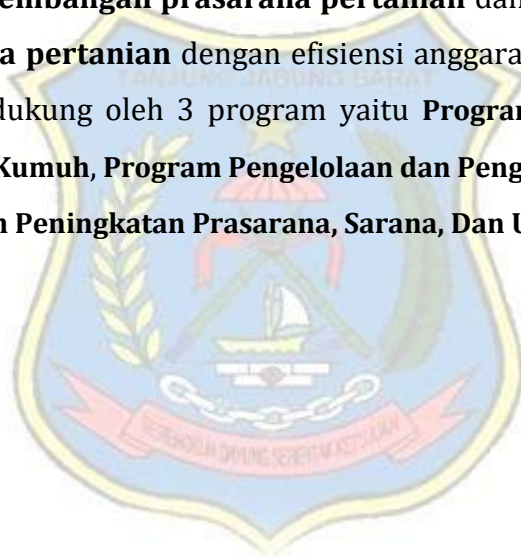
Table 36. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Indeks Gini Dan Indeks Infrastruktur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	(%)
Indeks Gini					
1	Program Pengembangan Pemukiman	Rp. 8,248,622,000	Rp. 7,910,419,500	Rp. 338,202,500	4.10
2	Program Penyelenggaraan jalan	Rp.153,955,274,724	Rp.152,512,575,751	Rp.1,442,698,973	0.93
3	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Rp. 1,936,740,400	Rp. 1,868,074,640	Rp. 68,665,760	3.55
4	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Rp. 5,297,343,750	Rp. 5,275,705,613	Rp. 21,638,137	0.41
JUMLAH		Rp. 169,437,980,874	Rp. 167,566,775,504	Rp. 1,871,205,370	1.10
Indeks Infrastruktur					
1	Program Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 1,706,140,000	Rp. 1,590,597,700	Rp. 115,542,300	6,77
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.4,240,172,808	Rp.4,054,986,002	Rp.185,186,806	4.36



3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)	Rp. 170,510,190,000	Rp. 168,749,149,014	Rp. 1,761,040,986	1,03
JUMLAH		Rp. 176,456,502,808	Rp. 174,675,340,386	Rp. 1,781,162,422	1.00

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota yang memiliki 2 indikator kinerja utama yaitu indeks gini dan indeks infrastruktur masing – masing sebesar 114.28% dan 66.32%. Untuk mendapatkan capaian kinerja tersebut indikator indek gini didukung oleh 4 program kinerja yaitu **program Pengembangan Pemukiman, Program Penyelenggaraan jalan, Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian** dengan efisiensi anggaran sebesar 1.10% sedangkan indeks infrastrukut didukung oleh 3 program yaitu **Program Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)**





3.2. REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari jumlah serapan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk



mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan, namun dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala daerah.

2. Realisasi Belanja

Untuk belanja daerah, alokasi dana yang dianggarkan pada tahun APBD 2023 adalah dengan adanya pengurangan penerimaan, maka komposisi anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan menjadi 1.868.021.329.123,00- dengan komposisi Belanja Daerah 1.750.016.891.196,17- atas pagu



anggaran APBD Perubahan tergambar dalam tabel:

Table 37. Jumlah Dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(DATA SEMENTARA NON AUDIT KEADAAN AKHIR DESEMBER 2023)

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI2023	SISAANGGARAN	%
BELANJA DAERAH	1.868.021.329.123,00	1.750.016.891.196,17	118.004.437.926,83	93,68
BELANJA OPERASI	1.053.425.648.790,00	949.893.217.780,04	103.532.431.009,96	90,17
Belanja Pegawai	501.730.225.438,00	444.479.924.638,10	57.250.300.799,90	88,59
Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	100
Belanja Barang dan Jasa	472.667.140.375,00	426.872.667.930,80	45.794.472.444,20	90,31
Belanja Modal	601.726.942.171,00	592.381.069.254,13	9.345.872.916,87	98,45
Belanja Hibah	73.628.282.977,00	73.180.625.211,14	447.657.765,86	99,39
Belanja Bantuan Sosial	2.400.000.000,00	2.360.000.000,00	40.000.000,00	98,33
Belanja Bagi Hasil	3.244.922.277,00	3.244.922.277,00	-	100
Belanja Bantuan Keuangan	194.025.691.600,00	194.025.691.600,00	-	100,00
Belanja Tidak Terduga	5.126.134.000,00	-	5.126.134.000,00	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah



Table 38. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rp. 204,802,054,636	Rp. 200,550,901,273	Rp. 4,251,153,363	97,83
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	Rp. 9,122,248,500	Rp. 8,705,294,441	94,88
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Rp. 1,102,684,800	Rp. 434,475,682	39,41
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	Rp. 1,910,381,400	Rp. 887,948,118	46,49
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Rp. 144.984.300	Rp. 136,512,400	94.16
6.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	Rp. 217.453.506.762	Rp. 211.505.032.810	97,27
7.	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	Rp. 7,376,932,800	Rp. 7,262,074,753	98,45
8.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	Rp. 9,057,430,260	Rp. 8,682,681,314	95,86
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<i>Indeks gini</i>	Rp. 169,437,980,874	Rp. 167,566,775,504	98,90
		<i>Indeks Infrastruktur</i>	Rp. 176,456,502,808	Rp. 174,675,340,386	99,25



Table 39. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i>	95.69	104.28	efisien
2.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	97.71	90.24	efisien
3.	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	39.40	93.83	efisien
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Nilai SAKIP Kabupaten</i>	46.48	96.89	efisien
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	94.15	99.10	efisien
6.	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	<i>Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan</i>	92.79	100	efisien
7.	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan lingkungan	<i>Laju pertumbuhan Ekonomi</i>	96.29	140.4	efisien
8.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i>	95.86	105.80	efisien
9.	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	<i>Indeks gini</i>	96.21	114.28	efisien
		<i>Indeks Infrastruktur</i>	90.25	66.32	efisien
RATA-RATA			93.87	101.11	Efisien

3. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dengan 10 Indikator Kinerja Utama, jika dilihat dari tabel diatas maka realisasi kinerja Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020/2023 dapat di kategorikan **SANGAT BAIK** dengan tingkat efisien anggaran yang baik pula, dimana rata-rata realisasi anggaran terhadap 10 Indikator Kinerja Utama sebesar 93.87% dan realisasi dari capaian kinerja sebesar 101.11%. jika dilihat dari perbandingan tersebut Maka **terlihat adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan**



anggaran pada program-program yang mendukung capaian kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023. Hal ini bisa menjadi motivasi bagi Pemrrintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus Meningkatkan Capaian Kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya



BAB IV

PENUTUP



Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 9 (Sembilan) sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja

tahun 2023, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil, Berhasil dan Cukup Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dan untuk memberikan gambaran tentang kinerja pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2023, menjabarkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, serta mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada *Stakeholder*.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 direkomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Revisi Renstra OPD
2. Revisi Indikator kinerja simultan dengan revisi renstra



3. Desk Reviu dan perbaikan perjanjian kinerja dari level Jabatan Tinggi s/d level operasional
4. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis tentang Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntansi Kinerja Internal
5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
7. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala, yang dimanfaatkan sebagai salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada setiap bulannya.
8. telah dilakukan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
9. Laporan Kinerja OPD per triwulan/tahunan sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja
10. dengan memberikan asistensi dan peningkatan Kompetensi kepada evaluator Inspektorat dan Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Tim Evaluator SAKIP KemenPANRB
11. Penilaian SAKIP dijadikan sebagai salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai



(TPP) yang diterima berdasarkan kategori prestasi kerja, berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat daerah tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di perangkat daerah.

Tindaklanjut dan perubahan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan capaian kinerja terhadap hasil evaluasi pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi mereviu rumusan tujuan/sasaran strategis Pemerintah daerah kepada Kemenpan dan RB RI dan Melakukan revisi rumusan sasaran strategis dengan disertai Berita Acara Perubahan serta mensinkronkan kembali sasaran strategis terhadap sasaran strategis OPD.
2. Melakukan asistensi mereviu indikator kinerja Daerah dan indikator kinerja OPD kepada Kemenpan dan RB RI dan Melakukan perbaikan indikator – indikator kinerja Pemerintah daerah dan OPD yang belum memenuhi kriteria SMART
3. Memperbaiki pohon kinerja Pemerintah daerah dan pohon kinerja OPD serta sinkronisasi.
4. Meminta asistensi kepada Kemenpan dan RB RI mengenai penyusunan kerangka logis dan Menyusun kerangka logis berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis
5. Telah disusum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan melakukan analisa lebih mendalam terkait faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja
6. merencanakan penyempurnaan sistem monev kinerja menggunakan aplikasi E-SAKIP Kabupaten;
7. Dengan memberikan asistensi kepada Evaluator inspektorat Kab Tanjab Barat dan OPD seKabupaten



8. Telah Melaksanakan Asistensi dan Pendampingan SAKIP bagi Perangkat Daerah di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bupati dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus Berkomitmen dalam melakukan perbaikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Ketentraman, Survey Kepuasan masyarakat, Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Lingkungan Hidup, Indeks Gini dan Indeks Infrasrtuktur dan akan melakukan pembinaan dan evaluasi guna untuk meningkatkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama kedepannya.

Akhirnya secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dipenuhi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal, Provinsi Jambi Kode Pos 36512
E-mail : itkabtjb@gmail.com Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Tungkal, 28 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH

Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

Capaian IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,16	68,79	71.44	69,47
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman	53,00	59.00	86.64	73,50
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	51,59	54,80	49.73	59,00
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	57,48	60,97	62,02	72,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,45	81.39	79.98	80,76
6	Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	1,36%	2,56%	3,51%	4,00%
8	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	68,25	69.61	72.69	70,00
9	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Indeks Gini	0,249	0,262	0,249	0,250
		Indeks Infrastruktur	62,15	70,56	79,27	73.19

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (TIM RB)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
1	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.42	1.42	1. Beberapa Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) 3. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 4. Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama 5. Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan 6. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 7. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	1. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 2. Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) 3. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 4. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama 5. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan 6. Melakukan reuiu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama 7. Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi	Tim Penilai Nasional	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan catatan dan rekomendasi dari Tim Penilai Nasional
27	RB Tematik	Strategi PelaksanaanRB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.23	0.23	1. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Kualitas rencana aksibelum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan 4. Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (masih cenderung business as usual)	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 4. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual	Tim Penilai Nasional	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan catatan dan rekomendasi dari Tim Penilai Nasional

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (INSEKTORAT)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
5	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.11	2.49	<p>1. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat sastra Pemda/OPD. maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum cukup (tidak dapat menggambarkan sasaran) 2. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat sastra Pemda/OPD. maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum relevan dan spesifik mendukung pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan 3. Masih terdapat target kinerja yang belum selaras dengan target di atasnya 4. Belum terdapat pencantuman MR sebagai indikator kinerja di tingkat OPD maupun Pemda 5. Belum terdapat SK Pengelola Risiko AOI APIP 1. SDM APIP masih belum memenuhi kebutuhan ideal (formasi kebutuhan) 2. Alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen 4. Pengawasan yang dilakukan belum menasar pada program strategis daerah dan belum dilaksanakan secara lintas sectoral 5. APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi MR hingga efektivitas RTP 6. Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultansi APIP belum menghasilkan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan bagi stakeholders. 7. Belum menerapkan QAIP secara optimal mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tindaklanjut hasil QAIP</p>	<p>1. Perbaikan pada indikator kinerja 2. Perbaikan pada indikator kinerja 3. Perbaikan pada indikator kinerja 4. Mencantumkan MR sebagai indikator kinerja dan menganggarkan SDM maupun dana untuk pengelolaan risiko di tingkat Pemda dan OPD 5. Menyusun PKPT Inspektorat berbasis risiko dengan menggunakan PPBR 6. Menyusun PKPT Inspektorat berbasis risiko dengan menggunakan PPBR Rekomendasi APIP 1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis operasional pengawasan intern 2. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern. pemenuhan kebutuhan SDM. penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi). penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. serta pembiayaan operasional pengawasan intern 3. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko. audit kinerja. dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan. dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP. CRMO. CFrA. dsb. 4. APIP agar menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral. serta berbasis prioritas dan risiko; Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/ bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko. audit kinerja. dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan. dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP. CRMO. CFrA. dsb. 5. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; dan Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaian kematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah (risiko strategis. risiko operasional. risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/kemitraan) 6. APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultansi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait 7. APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAIPi maupun pedoman QAIP lainnya yang telah diterbitkan oleh BPKP</p>	<p>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</p>	<p>1. (1, 2, 3) telah dilakuka perbaikan indikator pada beberapa indikator kinerja 2. (4) telah dialokasikan anggaran MR pada inspektorat di tingkat Pemda / telah dilaksanakan FGD Manajemen Resiko dan Rencana Tindak Pengendaliannya untuk seluruh perangkat daerah 3. (5, 6) PKPT Inspektorat disusun berdasarkan PPBR 4. telah dilaksanakan upaya pemenuhankebutuhan sdm setiap tahunnya melalui diklat dan sertifikasi 5. telah dipenuhi sarana prasarana inspektorat tahun 2023 baik dalam bentuk gedung baru dan alat transportasi yang secara bertahap terus dipenuhi 6 telah dilakukan kapabilitas APIP dengan merealisasikan CGCAE oleh Inspektur, QRMP oleh Sekretaris dan QRMA oleh Auditor 7.</p>
6	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5			<p>Instansi Pemerintah belum pernah mengusulkan unit kerja untuk dievaluasi zona integritas oleh TPN</p>	<p>Agar membangun unit kerja berintegritas dan melayani pada Instansi Pemerintah</p>	<p>Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas</p>	<p>masih dalam proses</p>
22	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	71.3	2.85			<p>Badan Pemeriksa Keuangan</p>	

24	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Survei Penilaian Integritas	10	71.35	7.14	Rentan	<p>Rekomendasi 1 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.; Rekomendasi 2 : Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Perbaiki mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Rekomendasi 5 : Perbaiki mendasar dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan implementasi dan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.; Rekomendasi 6 : Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan keberadaan hal-hal berikut: (1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten. (2) Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.; Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.; Rekomendasi 8 : Optimalisasi/ peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.; Rekomendasi 9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.</p>	Komisi Pemberantasan Korupsi	telah dilakukan intensifikasi, sosialisasi dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan yang dilakukan khususnya kebijakan regulasi dengan adanya 2 perub pengendalian kecurangan dan perub pengaduan masyarakat 3. sudah dibuatkan aplikasi wishtle blowing system
----	------------	---------------------------------	-----------------------------	----	-------	------	--------	---	------------------------------	--

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (DISKOMINFO)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
8	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5			Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"	Saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang akan menjadi dasar dalam menyusun Arsitektur SPBE as-in dalam SIA SPBE
10	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan				Waktu tindak lanjut masih lama	Sosialisasi dan Mempercepat Laju Tindak Lanjut	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik	Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat selaku Admin Koordinator Instansi LAPOR selain mendisposisikan pengaduan yang masuk, juga akan berupaya melakukan koordinasi dan menghubungi instansi terkait. Pada tahun 2024 semua pengaduan telah selesai ditindak lanjuti. Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat juga telah menganggarkan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SP4N-LAPOR pada tahun 2024 ini.
18	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	1.71	3.08		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Secara prinsip, dengan adanya implemntasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menuju cukup baik dibandingkan pada evaluasi tahun sebelumnya dalam menjalankan SPBE pada domain Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan masih kurang dipelaksanaan TIK, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat, secara umum menggambarkan predikat KURANG dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

									<p>Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah terkategori baik.</p> <p>Keunggulan ini terlihat dari terdapatnya 4 dari 10 indikator yang ada sudah pada tahapan kolaboratif (diantaranya layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan kinerja pegawai) dan 3 dari 10 indikator yang ada sudah pada tahapan otomasi (diantaranya layanan keuangan, kearsipan dinamis, dan pengelolaan barang milik negara/daerah)</p> <p>Namun disisi lain, Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Dimana pergup yang mengatur kebijakan internal SPBE perlu segera disahkan, dan secara umum masih perlu disusun arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai dengan pepres terkait sebagai kerangka dasar dan pemandi menuju tujuan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Diperlukan upaya yang lebih tinggi untuk mengawal implementasi tata kelola dan manajemen. Rancangan proses bisnis untuk setiap tata kelola terkait perlu segera disusun dan disahkan. adapun pelaksanaan manajemen di delapan area terkait juga perlu ditindaklanjuti dengan seksama, disertai dengan pelaksanaan audit internal yang saat ini masih belum berjalan dan perlunya segera mengagendakan pemanfaatan alat-alat audit dari BRIN. Layanan public berbasis elektronik perlu ditingkatkan terutama pada layanan pengaduna, layanan data terbuka, dan layanan publik-publik sector yang utama.</p> <p>Apresiasi layak diberikan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan internalnya yang secara umum sudah diupayakan untuk berjalan. Terutama dalam hal Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah ter kategorikan baik. Hal ini perlu dipertahankan, dijaga konsistensinya oleh tim koordinasi internal dan komitmennya oleh para pimpinan perangkat daerah, sehingga perlu ditingkatkan (terutama terkait kebijakan, tata kelola, manajemen, dan audit TIK). Berikut saran perbaikan yang perlu ditindaklanjuti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan konsep kebijakan internal SPBE beserta arsitektur dan peta rencana yang sesuai dengan perpres 95, Perpres 132 dan penyesuaian dengan SE Menpan RB 18, 20202. Penyusunan konsep perencanaan manajemen SPBE sesuai standar SPBE3. Standarisasi bukti dukung SPBE untuk meningkatkan penerapan knowledge management internal daerah4. Pembuatan narasi bukti dukung yang runut, jelas, dan komprehensif agar dapat menjadi pengetahuan bagi tim koordinasi internal serta mempermudah pemahaman para evaluator eksternal saat pelaksanaan audit SPBE per tahun.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEMBAR HASIL EVALUASI KEMENPAN BKAD

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penila	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
21	RB General	Strategi PelaksanaanR B General	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan	

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
9	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	47.88	1.19	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan alih media arsip statis, disertai dengan daftar arsip alih media, namun belum disertai dengan berita acara alih media arsip, autentikasi terhadap arsip hasil alih media	Arsip Nasional Republik Indonesia	sudah ada daftar alih media, berita acara alih media arsip dan foto kegiatan alih media (data dukung bisa diunduh di link https://drive.google.com/drive/folders/1iG8pi4DU4B1qsAm1N_5GULX10Wcs9ywY?usp=drive_link)

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (BKPSDM)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
15	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Sistem Merit	4	155	1.51		1. Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan;	Komisi Aparatur Sipil Negara	1. SKJ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tertuang dalam Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 570/Kep.Bup/ORG/2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2. SKJ Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sedang dalam Pembahasan Tim Penyusun SKJ dengan skema 1 Regulasi untuk 1 Jenis Jabatan
								2. Melakukan pemetaan kompetensi pada seluruh pegawai;		1. Tindak Lanjut MoU/PKS dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Admiistrator 2. Melaksanakan Mou/PKS Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara di Jatinangor Sumedang untuk Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator
								3. Melakukan pemetaan talenta;		Akan Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pemetaan Talenta Tahun 2025
								4. Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);		Strategi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Jangka Panjang (5 Tahun) dengan menyusun: 1. Data Kebutuhan Diklat jangka 5 Tahun (2022 s/d 2026) 2. Proyeksi Kebutuhan Pegawai ASN Jangka 5 Tahun (2024 s/d 2028)
								5. Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan mempertimbangkan hasil assessment pegawai;		1. Memenuhi kebutuhan organisasi dengan pengisian Jabatan Administrator melalui Promosi dan Mutasi dengan Pertimbangan Hasil Aseessment dan Kompetensi

									2. Memenuhi kebutuhan organisasi dengan pengisian Jabatan Pengawas melalui Promosi dan Mutasi dengan Pertimbangan Hasil Asessment dan Kompetensi
								6. Menyusun analisis permasalahan kinerja secara terstruktur dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.	1. Melakukan penyuluhan/sosialisasi Penyusunan dan Penerapan Kinerja ASN serta kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN secara berkala
23	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks BerAkhlaq	4	57.9	2.32	Cukup Sehat		Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (BAPPEDA)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
11	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	47.88	0	Nilai "nol" dan membutuhkan perhatian		Lembaga Administrasi Negara	
13	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	1.39	0.69	1. Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih berada pada predikat Kurang. 2. Penerapan Aspek Standar Data Statistik telah memperoleh predikat Baik karena dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. 3. Penerapan Aspek Perencanaan Data dan Aspek Penyebarluasan Data belum dilaksanakan oleh semua produsen data.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menerapkan proses bisnis statistik yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).	Badan Pusat Statistik	Penyelenggaraan Statistik sektoral akan diatur dalam bentuk Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bupati tentang tata kelola penyelenggaraan satu data Indonesia (SDI) Sedang dalam tahap penyusunan (Harmonisasi Ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi). Rancangan Peraturan Bupati tersebut diantaranya memuat tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (BAGIAN ORGANISASI SETDA)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99.32	1.99	Baik	Agar Perkada tentang SOTK mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tindaklanjut mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini agar berkoordinasi dengan KemenpanRB.	Kementerian Dalam Negeri	Segera melaksanakan koreksi dengan KemenPANRB sehubungan dengan mekanisme Penyederhanaan Birokrasi
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8		segera ditetapkan menjadi peraturan	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana	Berkoordinasi dengan BKPSDM sehubungan dengan pembentukan Tim Transformasi Manajemen
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	62.02	2.48	1. Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penetapan kinerja pada dokumen perencanaan 2. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment 3. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup 4. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD 5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah	1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan 2. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menilai capaian organisasi dan individu agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment 3. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya 4. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD 5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas	1. Revisi Renstra OPD 2. Revisi Indikator kinerja simultan dengan revisi renstra 3. Desk Reviu dan perbaikan perjanjian kinerja dari level Jabatan Tinggi s/d level operasional 4. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis tentang Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 6. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang 7. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMEKA) menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala, yang dimanfaatkan sebagai salah satu aspek penentu dalam memberikan reward dan punishment Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada setiap bulannya. 8. telah dilakukan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah 9. Laporan Kinerja OPD per triwulan/tahunan sebagai bahan perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja 10. dengan memberikan asistensi dan peningkatan Kompetensi kepada evaluator Inspektorat dan Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Tim Evaluator SAKIP KemenPANRB 11. Penilaian SAKIP dijadikan sebagai salah satu instrument untuk menentukan besar atau kecilnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima berdasarkan kategori prestasi kerja, berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat daerah tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan Implementasi SAKIP di perangkat daerah.

16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.56	1.07			Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik	
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	86.99	1.3			Ombudsman Republik Indonesia	
23	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks BerAkhlaq	4	57.9	2.85	Cukup Sehat		Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA	
25	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Survei Kepuasan Masyarakat	8				Melaporkan hasil pelaksanaan SKM yang telah dilakukan di tahun 2023	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	<p>Pada Tahun 2023 Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaporkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui link pelaporan SKM yang disediakan KemenPANRB, dokumen yang disampaikan adalah Laporan SKM yang dilaksanakan Tahun 2022. namun yang diminta oleh KemenPANRB adalah laporan SKM pada tahun berjalan yaitu Laporan SKM Tahun 2023, laporan dimaksud diminta untuk dilaporkan pada bulan Oktober 2023 sedangkan Laporan hasil SKM Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2023 dalam proses penyusunan oleh pihak ketiga, sehingga hasil final dari Laporan Hasil SKM Tahun 2023 selesai setelah tenggat waktu masa pelaporan yang diberikan oleh kemenPANRB.</p> <p>Pada pelaporan Hasil SKM tahun 2024 akan diupayakan agar pelaksanaan SKM pada Perangkat Daerah dapat dijadwalkan kembali untuk disesuaikan dengan tenggat waktu pelaporan Hasil SKM yang diberikan oleh KemenPANRB.</p>

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (BAGIAN HUKUM SETDA)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
11	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	47.88	0	Nilai "nol" dan membutuhkan perhatian		Lembaga Administrasi Negara	
12	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Reformasi Hukum	2.5	55.96	1.4	Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup.	Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.	Kementerian Hukum dan HAM	Data dukung terkait Pengharmonisasian bahwa akan menindaklanjuti saran perbaikan IRH sesuai dengan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.0102.-270 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023, dimana kelengkapan data dukung yang di upload dan melakukan penilaian mandiri akan ditindaklanjuti seoptimal mungkin

LEMBAR HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 KEMENPANRB (BAGIAN PBJ SETDA)

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai	tindak lanjut
14	RB General	Strategi PelaksanaanRB General	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	28.77	0.72	Kurang	Perlu dilakukan langkah strategis untuk bisa mendorong peningkatan tata kelola pengadaan.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<p>Bagian Pengadaan Barang/Jasa saat ini sedang memfokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dan Pemenuhan Kematangan UKPBJ untuk menjadi Level 3 atau Proaktif.</p> <p>-Pemenuhan Jafung Pengelola PBJ dan Kematangan UKPBJ termasuk dalam Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan, dengan memenuhi dua indikator tersebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa dapat mendongkrak nilai dari Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan.</p>

											<p>-Kemudian untuk meningkatkan nilai pada Indikator lainnya seperti SiRUP dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sudah di upayakan dalam Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 dengan menegaskan Penginputan RUP paling lambat 31 Maret 2024 dan Penyelesaian Paket Pekerjaan dari semua Metode Pengadaan seperti Pengadaan Langsung, E Purchasing dan E Tendering.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag
Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Tungkal, 2 JANUARI 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,83
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	100 %
3	Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	66,01
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,75
6	Meningkatnya Kinerja Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
7	Meningkatnya Perekonomian Kabupaten yang berwawasan Lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,00
8	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,78
9	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Indeks Gini	0,27
		Indeks Infrastruktur	68,41

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 728.868.285.222.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	RP. 123.547.887.779.00
3	Program Pengembangan Kurikulum	RP. 89.690.000.00
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RP. 175.568.000.00
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RP. 84.184.836.120.00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RP. 10.624.705.800.00
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RP. 554.743.000.00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RP. 327.421.000.00
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	RP. 14.879.999.162.00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RP. 519.320.000.00
11	Program Penataan Bangunan Gedung	RP. 70.986.160.000.00
12	Program Penyelenggaraan Jalan	RP. 131.181.232.972.00
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RP. 799.999.845.00
14	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RP. 1.516.080.000.00
15	Program Pengembangan Perumahan	RP. 1.623.200.000.00
16	Program Kawasan Permukiman	RP. 17.435.025.000.00
17	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RP. 1.962.830.000.00
18	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	RP. 102.604.805.000.00
19	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	RP. 51,000,000.00
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RP. 10.601.177.400.00
21	Program Penanggulangan Bencana	RP. 1.639.777.200.00
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RP. 5.609.958.800.00

23	Program Rehabilitasi Sosial	RP.	307.643.300.00
24	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RP.	72.015.000.00
25	Program Penanganan Bencana	RP.	54.425.000.00
26	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	RP.	55.117.050.00
27	Program Perencanaan Tenaga Kerja	RP.	103.790.800.00
28	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	RP.	462.719.600.00
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	RP.	704.648.200.00
30	Program Hubungan Industrial	RP.	205.131.000.00
31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RP.	545.819.600.00
32	Program Perlindungan Perempuan	RP.	468.231.200.00
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	RP.	64.636.000.00
34	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	RP.	458.608.400.00
35	Program Perlindungan Khusus Anak	RP.	495.218.800.00
36	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RP.	573.150.000.00
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan	RP.	243.639.000.00
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	RP.	28.348.000.00
39	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RP.	276.949.800.00
40	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RP.	106.396.000.00
41	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RP.	1.057.722.800.00
42	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RP.	71.608.000.00
43	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	RP.	82.992.000.00
44	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	RP.	35.336.000.00
45	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RP.	136.951.000.00
46	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RP.	70.585.000.00
47	Program Pengelolaan Persampahan	RP.	7.024.904.280.00
48	Program Pencatatan Sipil	RP.	8.599.200.00
49	Program Penataan Desa	RP.	67.262.000.00
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	RP.	1.050.102.800.00
51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RP.	1.288.877.050.00
52	Program Pengendalian Penduduk	RP.	285.744.000.00
53	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	RP.	3.573.630.400.00
54	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	RP.	1.949.328.400.00
55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	RP.	1.201.917.973.00
56	Program Pengelolaan Pelayaran	RP.	4.302.250.000.00
57	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	RP.	3.066.111.000.00
58	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	RP.	2.886.583.000.00
59	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RP.	19.300.000.00
60	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RP.	75.025.000.00
61	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RP.	17.600.000.00
62	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RP.	142.208.750.00
63	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RP.	190.228.100.00
64	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RP.	59.204.000.00
65	Program Promosi Penanaman Modal	RP.	80.996.000.00
66	Program Pelayanan Penanaman Modal	RP.	73.594.000.00
67	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RP.	600.370.850.00
68	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RP.	28.720.000.00
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RP.	453.329.600.00
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RP.	9.933.310.326.00
71	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RP.	500.000.000.00
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RP.	82.600.000.00
73	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	RP.	47.350.000.00
74	Program Pengembangan Kebudayaan	RP.	1.537.839.800.00
75	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	RP.	248.890.000.00
76	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RP.	88.940.000.00
77	Program Pembinaan Perpustakaan	RP.	844.668.000.00
78	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RP.	53.982.000.00
79	Program Pengelolaan Arsip	RP.	268.545.600.00
80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	RP.	2.713.554.000.00
81	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RP.	2.825.428.600.00
82	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RP.	109.112.000.00
83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RP.	1.312.201.000.00
84	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RP.	584.139.200.00
85	Program Pemasaran Pariwisata	RP.	464.706.000.00
86	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RP.	734.292.200.00
87	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RP.	78.993.000.00

88	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RP.	2.672.071.127.00
89	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RP.	11.576.600.000.00
90	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RP.	1.931.556.091.00
91	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RP.	498.553.230.00
92	Program Perizinan Usaha Pertanian	RP.	142.780.000.00
93	Program Penyuluhan Pertanian	RP.	2.114.544.000.00
94	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RP.	378.045.000.00
95	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RP.	1.322.599.800.00
96	Program Pengembangan Ekspor	RP.	198.747.500.00
97	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RP.	100.080.000.00
98	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RP.	503.702.800.00
99	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RP.	50.526.000.00
100	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	RP.	13.419.073.400.00
101	Program Perekonomian Dan Pembangunan	RP.	6.152.425.000.00
102	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	RP.	32.889.293.750.00
103	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RP.	346.424.800.00
104	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RP.	626.280.000.00
105	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RP.	222.503.603.300.00
106	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RP.	3.032.263.700.00
107	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RP.	2.754.848.000.00
108	Program Kepegawaian Daerah	RP.	3.039.528.400.00
109	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	RP.	118.225.200.00
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	RP.	2.875.686.800.00
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	RP.	375.290.000.00
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	RP.	276.977.400.00
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RP.	40.015.727.355.00
114	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	RP.	62.531.200.00
115	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RP.	291.410.200.00
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	RP.	1.494.760.183.00
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RP.	1.197.112.400.00
118	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RP.	13.983.000.00
119	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RP.	310.707.000.00
120	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RP.	268.941.000.00

Kuala Tungkal, 2 JANUARY 2024
 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

 Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag